

Era kontemporer (tiga abad terakhir) Kekristenan sarat dengan peristiwa historis. Pada era ini disingkapkan sifat dan karakter ke-*diri*-an paguyuban dan patembayan Kekristenan yang terus berevolusi. Dari kesatuannya dengan penguasa dan kekuasaan sipil (negara) sampai pemisahan, bahkan perseteruan, mengajarkan hikmat dan kearifan.

Paguyuban Kekristenan itu berakhir menjadi institusi, yang menekankan kembali moralitas, sebagaimana agama mesti disebut demikian. Institusi Gereja pada masa silam begitu menyatu, bahkan menikmati dan disalahgunakan oleh kekuasaan sekular (yakni negara).

Memang, dua entitas (negara dan agama) dalam kerja samanya yang dimaksudkan untuk kesejahteraan bersama bisa sangat "seksi". Namun, berulang kali kerja sama itu dilepeh demi kepentingan terselubung yang ternyata bersifat eksklusif dan egosentrik, serta mengorbankan manusia dan kehidupan.

Wujud perjumpaan dua entitas itu kini mengarah pada cakupan yang lebih luas dan mendasar, pada soal-soal dunia, kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Maka, dunia ini menuntut corak kerja sama, bukan otoritarianisme dan penguasaan-atas-yang-lain.

Jadi, dalam kebersamaan terjadilah peristiwa yang memengaruhi, menyentuh, memiliki hubungan, termasuk bumi pertiwi dan semesta alam. Catatan dan pemikiran historis dalam karya ini menyingkapkan banyak hal yang terselubung.

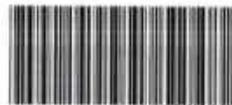
Gagasan, cara berpikir, alam pikiran, mental, etos, daya hidup, suasana batin, kesadaran, bahkan *elan vital* itu dalam era kontemporer Kekristenan menjadi jiwa (*Geist*) yang terselubung. Dengan begitu, daya tumbuh yang membuahakan kehidupan inilah yang disingkap oleh Kekristenan yang mendunia.

Antonius Eddy Kristiyanto, OFM



Seorang Fransiskan (OFM) menulis disertasi tentang *Uskup Kaum Buruh, Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877)* di Universitas Gregoriana, Roma (Italia); dan profesor Sejarah Gereja di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Buku ini melengkapi dua buku sebelumnya: *Gagasan yang Menjadi Peristiwa. Sketsa Sejarah Gereja Abad I-XV* (Cet. 6, 2019); *Reformasi dari Dalam. Sejarah Gereja Zaman Modern* (Cet. 5, 2019). Surel: eddy.kristiyanto@driyarkara.ac.id

 PENERBIT PT KANISIUS
J. Cempaka 8, Demasari, Caturtunggal,
Desa. Sleman, D.I. Yogyakarta 55581



1022001033

ISBN 978-979-21-7325-3



9 789792 173253

Harga P. Jawa Rp145.000,-

Antonius Eddy Kristiyanto, OFM



TERSELUBUNG KEJADIAN

Antonius Eddy Kristiyanto, OFM

TER
SELU
BUNG
KE
JADI
AN

Kekristenan Kontemporer

TERSELUBUNG KEJADIAN

Ketentuan Pidana

Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

TERSELUBUNG KEJADIAN

**Kekristenan
Kontemporer**

Antonius Eddy Kristiyanto, OFM



PENERBIT PT KANISIUS

**Terselubung Kejadian:
Kekristenan Kontemporer**

1022001033

©2022 PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS

Anggota SEKSAMA Penerbit Katolik Indonesia

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.co.id

Website : www.kanisiusmedia.co.id

Cetakan ke- 5 4 3 2 1

Tahun 26 25 24 23 22

Penulis : Antonius Eddy Kristiyanto, OFM

Editor : Rosalia Retno

Desainer isi & sampul : Hermanus Yudi

Nihil Obstat : Fl. Hasto Rosariyanto, SJ
Yogyakarta, 21 April 2022

Imprimatur : YR. Edy Purwanto, Pr. - Vikjen KAS
Semarang, 28 April 2022

ISBN 978-979-21-7325-3

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta

Daftar Isi

Pembuka.....	7
Dalam Hangatnya <i>Ancien Régime</i>	13
Terima Kasih, Revolusi Prancis!	43
Di Antara Dua "Isme"	69
Pio Nono & Muktamar.....	89
<i>Nach Canossa Gehen Wir Nicht!</i>	107
Mengapa Peduli pada Masalah Sosial?	131
Modernisme, Biang Kesesatan?	169
Di Dua Perang	203
Vatikan Dua	229
Kekristenan Pasca-Vatikan Dua	257
Penutup	287
Daftar Pustaka	293
Gambar dan Keterangan Sumber	313
Indeks Nama.....	323

Pembuka

Saudara dan Saudari sedang memegang buku yang dimaksudkan untuk menyediakan bacaan yang berkelanjutan dari sejarah institusi agama, yakni Kekristenan. Buku ini membutuhkan waktu relatif lama untuk menimbang, meluruskan, menanyakan, memeriksa kembali agar menjadi karya yang seimbang dan komprehensif sekaligus relevan serta inspiratif, terutama untuk memenuhi syarat-syarat historiografi dewasa ini. *Spirit* dan aura yang tetap dipertahankan serentak terpancar dalam buku historis ini adalah *bagaimana mengedepankan secara "reasonable" gagasan di balik aneka ragam peristiwa dan kejadian historis*. Itulah sebabnya, buku ini berjudul "Terselubung Kejadian". Alasan utamanya adalah: dalam kesadaran saya, indra kita melakukan fungsi dan peran secara terbatas. Misalnya, mata kita hanya melihat suatu peristiwa dan kejadian. Untuk mengerti secara lebih lengkap dan mendalam peristiwa dan kejadian, kita membutuhkan perangkat lain, seperti pengertian (pemahaman), berfungsinya akal budi, sinkronisasi antara apa yang dilihat dengan daya nalar, lalu apa yang dipancarkan oleh hasil sinkronisasi itu, dan lain sebagainya.

Dengan judul *Terselubung Kejadian: Kekristenan Kontemporer* saya bermaksud menyatakan sikap konsisten saya berkenaan dengan aliran sejarah yang dianut. Pasalnya, inti terdalam dari semua gerak perubahan

dalam lembaga keagamaan utamanya adalah pemikiran, gagasan (*ide*), alam nalar yang memengaruhi dan bahkan menentukan perubahan yang terwujud dalam kejadian atau peristiwa. Dalam khazanah iman-kepercayaan: "yang terselubung kejadian" itulah *rahmat, karunia, pemberian, daya ilahi, kehendak Allah* bahkan nyawa, jiwa atau *spirit* yang pada gilirannya termanifestasikan dalam peristiwa, kejadian, *event*, yang tampak oleh indra insani. Dengan perkataan lain, setiap peristiwa historis memiliki logika, runtutan alam pikiran yang secara kronologis mendahului *historical events*. Secara kasat mata indra kita melihat apa yang terpampang. Namun, mata budi dan hati kita mampu melihat yang lebih jauh, lebih dalam, lebih luas, sehingga kita mengerti apa yang ada di balik yang terlihat, memahami kehendak (*voluntas*), dan bahkan motivasi dari yang tampak oleh mata telanjang. Jadi, alam pikiran, laku nalar, motivasi yang menyertai kehendak itulah yang kita ulik. Inilah pula makna di balik peristiwa yang terjadi.

Praktis cakupan periode yang digarap buku ini membentang dalam (sekitar) 3 (tiga) abad, yang biasa disebut era (zaman) kontemporer. Periode ini dimulai Pra-Revolusi Prancis sampai masa kini. Dalam pemahaman saya, ada unsur-unsur mentalitas, bahkan peradaban yang mematangkan bagi terbitnya suatu mental yang sama sekali baru. Peradaban itu saya tengarai sebagai *ancien regime* (tata cara, tata aturan, tata laksana yang disebut "kuno" dan "lama" yang serba *incompatible* oleh generasi sesudahnya).

Buku ini, sebagaimana 2 (dua) buku sebelumnya, yakni *Gagasan Yang Menjadi Peristiwa* (2003, cetakan ke-6 tahun 2019) dan *Reformasi dari Dalam* (2004, cetakan ke-5 tahun 2019), dimaksudkan pertamanya untuk mengedepankan gagasan yang melatarbelakangi peristiwa serta menemukan korelasinya dengan gagasan lain. Dalam hal ini saya membaca alam pikiran J. Lortz (13 Des. 1887-21 Feb. 1975), seorang imam dan sejarawan Katolik berkebangsaan Jerman, yang mengenakan

pola runtut dan metode mirip dalam karyanya, *Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung*. 2 Bd. Aschendorff: Münster, 1962-1964.

Meskipun ada satu-dua alur pemikiran Lortz yang tidak saya setuju, misalnya pandangannya tentang modernisme di mana ia mengakomodasi gagasan Pius X tentang modernisme yang dikecamnya sebagai biang (dan induk) segala (macam) kesesatan (yang tidak menyelamatkan), dan pandangannya tentang gereja Katolik tahun 1800 dan 1900 sebagai kubu baluarti kebenaran Ilahi dan nilai-nilai moral di tengah busuk dan runtuhnya masyarakat Barat, tetapi metode ilmiah yang menawan berkenaan dengan sejarah gereja tetap mengagumkan. Itulah sebabnya dalam opini saya, *sejarah tidak pernah kaku dan mengeras menjadi data semata-mata yang tidak terbuka dan tidak relevan bagi masa depan yang hendak melayani kehidupan manusia*. Dalam perspektif ini, metode kerja seperti itu dapat mengantar para pembaca (pembacaan ulang dan reinterpretasi) karya sejarah sampai pada sikap memetik manfaat sejarah sebagai sarana teruji bagi perjuangan kualitas kehidupan sarwa ciptaan dan makhluk yang tidak pernah bebas nilai.

Dalam catatan personal saya (berdasarkan sumber-sumber historis yang saya manfaatkan), bahasan dalam buku ini sebagian terbesar pada agama (yang meliputi: institusi atau lembaga gereja; ajaran atau doktrin; ragam refleksi teologis dan historis; ritus atau tata cara berdoa, sembahyang, atau peribadatan; dan cara hidup sehari-hari) Barat Kristiani, lebih khusus lagi Katolik (kontinental) atau Eropa Daratan. Hal ini hendak menyatakan bahwa *spirit* dan kekuatan Kekristenan itu utamanya berpusat di Eropa Barat. Akan tetapi, sebagaimana tengah terjadi dan terbukti, yang disebut dengan sentra Kekristenan Barat itu berangsur-angsur sedang bergeser. Salah satu studi dan kajian yang dilakukan oleh P. Jenkins (Jenkins, 2011; 2003) memperlihatkan ketersebaran Kekristenan dari kawasan utara (yang mulai menua dan merenta karena gesekan dengan ilmu pengetahuan, agnostisisme, sekularisme, dan

utamanya "ketidakpedulian") menuju kawasan selatan (Asia, Afrika, Amerika Selatan). Membaca dengan cermat sejarah paguyuban Kristiani, dan lebih khusus Katolik Roma, saya semakin yakin bahwa sejarah ini terlalu banyak dijejali oleh intrik-intrik kekuasaan politik, dan kuasa Roma hemat saya terlalu sibuk dengan bagaimana mempertahankan otoritas yang dibungkus dengan wahyu (kuasa adikodrati). Dalam situasi itu kemudian dapat dimengerti mengapa ada pelbagai gempuran yang berasal dari ilmu pengetahuan (*sains*), antiklerikalisme, eksese gagasan dan praksis Revolusi Prancis, disputasi teologis, masalah moral yang terbilang dalam ranah *syllabus errorum* dan modernisme, dan lain sebagainya.

Mencermati dengan saksama perjalanan sejarah sosiologis terutama dinamika paguyuban (*Gemeinschaft*) dan patembayan (*Gesellschaft*) - meminjam studi yang diukir oleh Ferdinand Tönnies, 1887) - Kekristenan menerbitkan dan membangun adat, kepercayaan, empati yang saling meneguhkan yang pada gilirannya menjalin hubungan sosial yang kuat. Dalam interpretasi saya, terkadang saya mengamini bahkan mensyukuri bilamana Kekristenan yang "sangat barat" itu digempur, diserang, dan dengan demikian dimurnikan sehingga menemukan jiwa awal dan jati dirinya yang baru tanpa mengkhianati amanat utama untuk apa kekristenan diselenggarakan. Satu-dua hal yang membuat saya terkesima adalah perjalanan akal budi dan ilmu pengetahuan yang menjernihkan iman, agama, persekutuan hidup bersama.

Berkenaan dengan beberapa bab dan bagian dari buku ini merupakan hasil perombakan (revisi) menyeluruh sesudah dipublikasikan dalam beberapa media, misalnya tentang absolutisme yang dimuat di *Melintas: A Journal of Philosophy and Religion*. Vol. 21, No. 2, Aug.-Nov. 2005: 211-230. ISSN 0852-0089; perihal masalah sosial yang berhubungan dengan Ensiklik *Rerum Novarum* dan terutama tokoh pendahulunya, Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877), merupakan hasil kajian

ulang atas *Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual*. Kanisius: Yogyakarta, 2001, hlm. 165-180. ISBN 979-672-856-7. Selain itu, pembahasan tentang modernisme (dalam perspektif teologi historis Katolik) sebelum diedit pernah dimuat dalam *Diskursus. Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*. Vol. 4, No, 3, Okt. 2005, 251-277. ISSN 1412-3878. Gagasan tentang fundamentalisme pernah dipresentasikan dalam paper untuk dialog Klub Kajian Agama ke-178 bersama (alm.) Nurcholish Madjid, Jalalludin Rakhmad, dengan tema "Berperang atas Nama Tuhan: Ekspresi Fundamentalisme Keagamaan Sepanjang Sejarah", di Universitas Paramadina, Jl. Gatot Subroto 97-99, Jakarta, 24 Mei 2002. Semoga karya ini berguna bagi kita semua yang terus-menerus mengasah diri, sehingga kian terbuka terhadap kebaikan dari mana pun asalnya demi kualitas hidup kita bersama. Jejak langkah kita yang dinamis menjadi penanda kepercayaan dan harapan yang melampaui kerapuhan kemanusiaan kita.

Akhirnya, di penghujung karya ini, saya membuat catatan personal berikut ini. *Dengan diterbitkannya karya ini, tak terbandung amukan emosi di dalam diri. Nyaris tak terbayangkan karya ini akhirnya tergenapi dan tuntas. Meski ada rasa belum puas atas karya ini, namun kalau tidak disudahi, maka kapan jadinya akan berkesudahan? Bertahun-tahun lamanya ini dirancang, namun seakan kandas dan tidak akan dipublikasikan dengan stroke yang melumpuhkan yang saya terima beberapa tahun lalu. Kesigapan lagi keligatan para saudara di sekitar saya, intervensi medis, kepercayaan pada kinerja akal budi, dan iman-kepercayaan membuat saya dengan pelan, sabar, konsisten memperoleh nyawa kedua. "Spirit" batin yang kedap-kedip ini tidak pernah menjadi padam di tengah daya ingat yang raib tanpa ujung pangkal, dan kehendak (keinginan) menjadi lumpuh tanpa daya. Latihan yang tak mengenal usai, serta mimpi-mimpi yang terus dihidupkan. Tak terhitung berapa pribadi yang dengan pelbagai cara menyetatkan dan menyembuhkan saya kembali sehingga tidak mengenali lagi laku manja, berani melakukan kenekatan suci, dukungan yang sangat nyata*

*dari keluarga dan sahabat/persaudaraan. Semua hanya kerelaan, keikhlasan, dan syukur yang tak bersudah. Kepada semua saudara yang hidup dalam perbuatan dan keutamaan itu, saya persembahkan karya ini. *****

Menandai 25th di STF Driyarkara, Jakarta

Antonius Eddy Kristiyanto, OFM

DALAM HANGATNYA *ANCIEN RÉGIME*

Minimal ada tiga unsur yang memberikan batasan tentang l'ancien régime, yakni para konstituen, warga bangsa, dan sejarawan. Ketiga batasan itu bersangkut-paut dengan peristiwa tahun 1789. Lebih lanjut, l'ancien régime merupakan situasi yang sulit dalam batasan kronologi yang ketat, seperti keluar dari cara alami Abad Pertengahan, seperti manusia dewasa keluar dari masa kanak-kanak, atau orang tua dari pribadi matang, antara perang 100 tahun dan perang agama-agama (Cfr. Pierre Goubert, 1974, 11).

Hubungan antara lembaga negara dan lembaga kegerejaan teristimewa di Eropa Barat merupakan bab yang menarik untuk dijabarkan (Eddy Kristiyanto, 2004: 74-136). Ada sekian banyak konsiderasi yang menyebabkan pokok *Kekristenan dan ancien régime* ini (Eddy Kristiyanto, 2005b) menarik perhatian. *Pertama*, semenjak Konstantinus Agung (bahkan sebelumnya), yakni abad ke-4 Masehi, "Eropa" tidak dapat dimengerti tanpa Kekristenan. Sebuah hipotesis menyatakan bahwa asal-usul kekuasaan gereja sebagai sebuah entitas religius adalah *donatio constantini*. *Donatio Constantini* artinya pemberian Konstantinus (Agung). Maksudnya, dengan memindahkan ibu kota Kekaisaran Roma dari Roma ke Konstantinopel (kini: Istanbul) Kaisar Konstantinus Agung memberikan otoritas dan kekuasaan di wilayah

barat Kekaisaran Roma kepada paus. Sejak saat itu, Sri Paus Silvester I (314-335) menjadi satu-satunya penguasa tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan demi kesejahteraan rakyat. Meskipun hipotesis ini baru dipatahkan berkat studi Lorenzo Valla, seorang anak zaman humanisme-renaisans, namun tidak semua orang memahami dan yakin akan kebenaran studi tersebut.

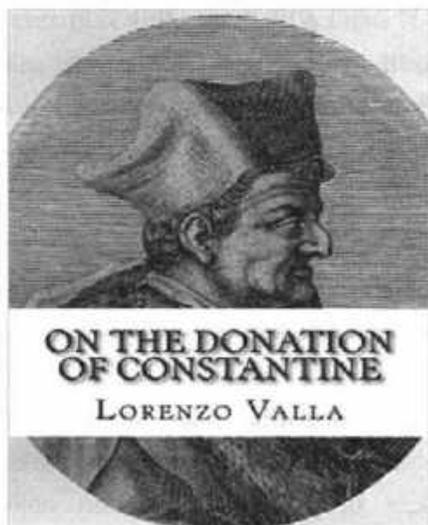
Kendati demikian, sejarah juga mencatat bahwa Eropa yang melekat dan bahkan menjadi bagian integral Kekristenan itu mendapat legitimasi historis dari kiprah para misionaris (seperti Patricius, Columbanus, Bonifatius, Willibrodus); para rahib (terutama dari Ordo Santo Benediktus) bukan saja membudayakan Kekristenan, tetapi juga pada gilirannya Kekristenan dibudayakan dan dirasuki oleh nilai-nilai lokal (setempat). Sejarah awal Kristianitas di Eropa memperlihatkan dengan jelas bagaimana agama (baca: gereja) merasuki tata budaya masyarakat Eropa, dan pada gilirannya terjadi yang sebaliknya. Kedua entitas (negara dan agama) seakan-akan tidak terceraiakan, sehingga pada Abad Pertengahan Eropa diidentikkan dengan Kekristenan; demikian pula sebaliknya, Kekristenan itu Eropa.

Kedua, jika sistem pemerintahan dalam gereja dipengaruhi langsung oleh pola dan sistem pemerintahan dalam kekaisaran Romawi, misalnya struktur hierarkis, maka pada gilirannya pola dan sistem pemerintahan negara kepausan menginspirasi pola dan sistem pemerintahan yang demokratis (Prodi, 1982).

Ketiga, meskipun di kemudian hari pengalaman Eropa memperlihatkan bahwa agama (gereja) perlu dipisahkan dari negara melalui proses separasi (entah separasi murni, separasi campuran, separasi bermusuhan, entah sistem konkordat (Martina, II, 42-60)), namun proses terjadinya separasi itu selain alot, juga (bahkan) memakan korban, terutama pada pihak yang tidak memiliki otoritas untuk memaksakan kehendak-kekuatan militer. Dalam sejarah Kekristenan yang sangat

dinamis “perkawinan” lembaga gereja (agama) dan negara sebenarnya lebih merugikan keduanya, terlebih masyarakat (rakyat) yang sama yang menjadi anggota/umat beragama sekaligus warga negara.

Mempertimbangkan ketiga faktor tersebut, bab ini menyoroti secara khusus dampak relasi-tak-terceraikan antara gereja dan negara tersebut. Perlu digarisbawahi, relasi itu selalu membawa korban, yakni pihak yang lemah, tanpa kekuatan memaksa, melumpuhkan, dan mematikan. Akan tetapi pada gilirannya, kebenaran-kebenaran agama dapat dimanipulasikan dengan ketetapan-ketetapan yuridis demi mendukung pelestarian kekuasaan sipil. Masa *ancien régime* telah berakhir, dan hal ini disebabkan pula oleh skeptisisme zaman *Aufklärung* pada agama (baca: lembaga gereja) yang tidak berdaya guna.



Opini yang diperdengarkan menyatakan bahwa kekuasaan Sri Paus (di Gereja Barat) diberikan oleh Kaisar Konstatinus Agung mengingat kepindahan ibukota Kekaisaran dari Roma ke Konstantinopel (Istanbul), 324.



Dalam karyanya, Anderson (Anderson, 1988) mencatat bagaimana konflik dalam masyarakat *Old Regime* (baca: orde lama) yang mewakili pelbagai kepentingan dan kekuasaan, misalnya kelompok feodal, anggota masyarakat yang mulai menekankan profesionalisme, pemerintah dan militer yang mempunyai kekuasaan monopoli, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, bab ini mengangkat bentuk-bentuk faktual-

yuridis yang diciptakan oleh negara untuk memperlihatkan superioritas dan bahkan absolutismenya atas lembaga keagamaan. Pada akhirnya akan dikemukakan pertimbangan-pertimbangan objektif dari model relasi yang dibahas di sini.

Masalah Pendekatan

Mempelajari pelbagai peristiwa yang telah terjadi demi penghayatan yang semakin intensif akan masa kini memungkinkan orang untuk menemukan kebijaksanaan dan memiliki wawasan luas. Maka, melalui bab ini hendak dijawab persoalan: *Manakah ciri-ciri relasi antara institusi negara dan institusi gereja yang memengaruhi hayat hidup orang banyak?* Sementara itu, kurun waktu dan ruang lingkup yang dijadikan objek bab ini meliputi dua abad, yakni ke-17 dan ke-18. Peta politik kekuasaan di Eropa Barat pada saat itu memperlihatkan dengan lebih kurang jelas hegemoni kekuasaan pemerintah Prancis. Tegasnya, ciri-ciri mencolok mata relasi kedua institusi tersebut merupakan stigma yang menandai negara-gereja sebelum Revolusi Prancis.

Mengingat bab ini pun mengandalkan metode atau pendekatan historis, maka di sini juga dimanfaatkan sejumlah sumber historis, buku atau jurnal. Oleh karena bab ini mengenakan pendekatan historis, salah satu cara kerja yang perlu ditempuh adalah mengumpulkan sejumlah sumber yang berbicara tentang monarkianisme yang bercorak absolut(isme). Cara kerja ini disebut konvergensi sumber. Semakin banyak sumber yang dimanfaatkan untuk menyingkapkan objek pembicaraan bab ini, semakin besar kemungkinan bab ini mencapai kebenaran historis.

Melalui bab ini akan diverifikasikan relasi konkret antara dua institusi, yakni negara dan agama, khususnya gereja Katolik Roma. Berdasarkan bacaan-bacaan yang tersedia, saya memperoleh kesan bahwa kedua institusi tersebut pada abad ke-17 dan ke-18 menikmati

sejumlah privilese. Hak-hak ini didukung oleh ketetapan-ketetapan yuridis dan dilegitimasi oleh tradisi yang selama beberapa abad dipertahankan eksistensinya. Bab ini hendak memperlihatkan secara ilmiah absolutisme politis-sosio-religius yang sungguh diminati oleh "oknum-oknum" tertentu yang berkecimpung di dunia pemerintahan dan hierarki-kegerejaan.

Pengamatan Umum

Agar pemahaman kita tentang situasi komunitas gerejawi pada abad ke-17 dan ke-18, yang kemudian disebut "Zaman Absolutisme", bersifat menyeluruh, maka rincian berikut ini dapat dimanfaatkan (Hufton, 1990, Anderson, 1988). Secara formal, masyarakat Eropa Barat saat itu beragama Kristen. Ada wilayah-wilayah sejumlah negara Eropa Barat yang seakan dibagi-bagi dengan hunian penduduk yang lebih banyak homogen daripada heterogen dalam perspektif agama. Misalnya, Portugal, Spanyol, Italia, Jerman (Selatan), Prancis (Selatan dan Tengah) sebagian besar dihuni oleh penduduk berbendera Katolik. Pemegang tampuk pemerintahan negara-negara itu tidak berasal dari satu aras keyakinan politis, tetapi ada pelbagai motivasi kepentingan kekuasaan. Tetapi secara umum, lingkungan, struktur sosial, undang-undang, adat kebiasaan diinspirasi oleh prinsip-prinsip dan tata laksana Kristiani. Dari lahir hingga mati manusia berada dalam budaya yang sangat kental dengan jiwa dan warna Kristiani. Ia dibimbing langkah demi langkah oleh struktur kepercayaan ini. Jadi, masyarakat sendiri berinspirasi agama.

Gereja merupakan subjek yang dalam arti tertentu dibelenggu dengan rantai yang berat dan banyak. Rantai itu bukan pertamanya berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab yang berciri corak "menyejahterakan anggotanya" dan "mempertaruhkan segalanya demi keadilan, kebenaran, dan penyelamatan", tetapi terutama ketidakrealan

kehilangan kekuasaan dan kekayaan material. Negara segan mengakui keberadaan bentuk masyarakat yang lain, yang menyatakan bebas-merdeka terhadapnya. Menghindari diskusi-diskusi teoretis yang tidak bermanfaat, negara menjadi "tuan" atas gereja, membelanya dari setiap bahaya dan menjamin berhasilnya karya kerasulannya dengan menerapkan kontrol yang ketat atas segala aktivitas gereja, yang berakhir dengan kelumpuhan dan penderitaan gereja. Gereja dengan demikian kehilangan sebagian besar kebebasannya: mata rantai yang mengikat gereja itu terbuat dari emas, tetapi bukan karena itu maka rantai itu tidak menjerat gereja.

Gereja dibebani semangat untuk memiliki hal-hal dunia seperti materi, kekuasaan, uang. Sementara itu di sana-sini, para pemimpin jemaat seperti uskup dan imam mencari kekayaan dan penghormatan. Kuria Roma tetap menjadi pengumpul kekayaan dan kemewahan. Para *klerus* menikmati hak istimewa, yang membuat mereka tidak lagi mengutamakan *reksa rohani* bagi jiwa-jiwa yang dititipkan Tuhan kepada mereka. Para gembala itu juga jauh dari kerinduan akan hidup rohani yang mendalam dan kokoh. Penggembalaan yang disebarluaskan atas dasar otoritas injili dalam wujud kerendahan hati dan kemiskinan dihargai sangat rendah. Jadi, kendati struktur resmi masyarakat tetap beraroma dan bernuansa Kristiani, namun skeptisisme dan korupsi selalu menyusup secara lebih luas dan mendalam, sekurang-kurangnya pada akhir abad ke-17 (Delumeau, 1986, 491-613). Keburukan ini menyiapkan pengingkaran oleh Eropa terhadap agama (pada umumnya dan agama Kristen pada khususnya).

Tanggung jawab historis keadaan ini juga dilimpahkan kepada institusi gerejawi. Pertanyaannya adalah: *mengapa gereja mendapat pelimpahan tanggung jawab itu?* Meskipun tidak sepenuhnya disadari dan tidak dikehendaki oleh anggota gereja, tetapi institusi gerejawi secara berangsur-angsur mengalami apa yang disebut sebagai sekularisasi.

Maksudnya adalah institusi gerejawi tidak bisa tidak menerima dari masyarakat, lembaga negara, cara hidup, ideologi, dan pengetahuan dari masyarakat yang pada dirinya sendiri bukan berciri-corak atau beridentitas institusi gerejawi. Dengan demikian, ada proses dan pengalaman "penduniaan" (sekularisasi), mengingat institusi gerejawi itu pada kurun waktu itu (atau sekurang-kurangnya selama periode yang lama) menyibukkan diri dengan cara tertutup, bahkan segala sesuatu dianggap sebagai urusan dan tanggung jawab gereja. Akan tetapi, agaknya terlalu sederhana jika kita mereduksikan masalah yang demikian kompleks (dan kait-mengait) ke dalam sebuah istilah yang begitu menyedihkan.

Ciri Umum Absolutisme

Pokok pembicaraan kita tentang ciri umum absolutisme (Bussi, 1985: 419-470; Martina, 1986, II: 7-88) sengaja dibatasi pada hal-hal hakiki, yang secara langsung memengaruhi kehidupan gereja. Zaman Absolutisme, juga disebut dengan *ancien régime* (Goubert, 1974), rezim lama (orde lama) pada umumnya meliputi masa Pra-Revolusi Prancis, yakni abad ke-16,17,18. Tetapi dapat juga dimasukkan dalam periode ini peristiwa 1815 sampai 1830 (1848), yakni zaman restorasi yang gagal setelah meletusnya Revolusi Prancis (Nipperdey, (I). 1987: 227-402). Beberapa tahap dari periode ini: *Absolutisme murni* (abad ke-16-17: zaman Raja Phillipus II, Louis XIV, dan Ratu Elisabeth); *Dispotisme Enlightenment* (dengan tokoh kaisar dari wangsa Habsburg, Yosef II, dan Petrus Leopold) dan para penguasa, yang ingin menerapkan prinsip *Enlightenment* dalam bidang politik, yakni memerintah dan berkuasa dengan dasar-dasar nalar sehat; *Restorasi* (dengan tokoh seperti Raja Louis XVIII dan Carolus X dari Prancis).

Secara *politis*, pemimpin negara menyatakan dirinya sebagai pribadi yang bebas (*absolutus!*) dan luput dari setiap otoritas di luar dirinya. Pemimpin itu berkuasa mutlak, dan tidak ada pihak yang dibenarkan untuk mengoreksi, apalagi mempersalahkannya. Jadi, terhadap pihak luar, tidak dikenal lagi otoritas imperial dan kepausan. Seorang raja, misalnya, dia memegang tampuk kekuasaan tertinggi bagaikan seorang kaisar yang *nirmala*. Terhadap pihak intern, penguasa melakukan pemusatan kekuasaan. Segala bentuk kekuasaan dan kekayaan diarahkan kepada dirinya. Ia memegang kendali sentralisasi. Di tangan raja terkumpul semua kekuasaan politik secara menyeluruh, tidak terbagi dan tak dapat diganggu gugat. Ini juga merupakan cara pemimpin untuk berada di atas segala tatanan masyarakatnya. Jadi, betul-betul seorang pemimpin itu mendominasi, merajai, menguasai segala sesuatu, sehingga ia menjadi pribadi yang *untouchable*.

Wujud absolutisme terlihat dalam kebijakan untuk menekan atau membatasi otonomi daerah, pengembangan keseragaman administratif kerajaan. Administrasi diatur berdasarkan *petunjuk-petunjuk pelayanan*, bukan atas dasar hukum. Demikian pula praktik perpajakan. Hanya dengan penetapan raja saja pajak dapat dipungut. Militer langsung mengabdikan demi kepentingan raja. Lantaran tiadanya distingsi yang jelas antara hak pribadi dan hak publik, kekayaan apa pun dalam wilayah kerajaan pada prinsipnya menjadi milik raja. Jika raja mangkat secara teoretis, ia dapat meninggalkan kepada pengganti, yang dapat dia sendiri tentukan jauh sebelum ia wafat. Masuk akal jika para raja menganggap para bangsawan sebagai musuh potensial mereka, sebab mereka ini merupakan "pihak terdidik" yang dapat menggerogoti kekuasaan untuk kemudian mencari dukungan dari tataran *grassroot*. Lalu, raja mengangkat para ningrat sebagai pembantu-pembantunya dalam kaidah dan tata cara nepotisme. Akan tetapi, mereka ini tidak lebih sebagai eksekutor titah penguasa, yang tidak memberi tempat pada kritik dan

kontrol. Penguasa tertinggi menjadi tiran yang memegang segala kendali pemerintahannya.

Secara *sosial*, absolutisme berdasar pada ketidaksamaan antara pelbagai kelas dan kelompok dalam masyarakat. Dengan kata-kata lain, *privilese* diberikan oleh raja kepada beberapa kelompok saja. Jadi, ada sekelompok kecil orang yang diistimewakan. Tentu saja, situasi ini sesuai dengan mentalitas umum zaman itu, misalnya ketidakmampuan untuk memikirkan kesamaan dasariah tentang hak dan kewajiban; struktur masyarakat bersifat hierarkis, sehingga begitu lahir orang hanya mempunyai satu tugas, yakni melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sekelompok kecil ini, yang memiliki *privilese*, dan yang mengumpulkan semua kehormatan, kekayaan, kekuatan, dan kekuasaan dalam tangannya, berhadapan dengan massa anonim yang tak memiliki *privilese*, yang biasa hidup dalam kondisi ekonomi *memelas*. Mereka ini tidak memiliki kemungkinan untuk mendengarkan suaranya sendiri. Sebab selain selama ini yang mereka dengar hanya suara mereka yang *berprivilese*, mereka juga tidak memiliki hak berpolitik.

Secara *sosial*, banyak di antara mereka yang meniti karier dengan menjadi militer (sebab dengan demikian mereka dapat memperlihatkan loyalitas pada monarki). Oleh karenanya, hanya para bangsawan dalam kenyataannya dapat menjadi opsir. Seakan mereka ini dinaungi terus-menerus oleh *Dewi Fortuna*, dan dapat menghadiri pesta-pesta yang diadakan keluarga dan lingkungan kerajaan. Mereka ini bagaikan "hati raja", yang karena itu mempunyai hak untuk duduk dekat dengan raja. Seorang bangsawan hanya akan mewariskan harta bendanya kepada keluarga dan kelompok mereka. Dengan demikian, kemungkinan mengalirnya harta kekayaan ke keluarga atau kelompok lain ditutup. Pekerjaan tangan tidak pernah mereka lakukan dan juga tidak mereka minati. Sebab jenis pekerjaan ini tidak sesuai dengan martabat mereka sebagai bangsawan (layaknya dalam masyarakat yang gemar pada *while*

colour job). Bagi mereka, hukum tidak sama untuk semua. Maka dari itu, jenis pekerjaan itu hanya ditangani oleh orang-orang rendahan dan mereka yang berstatus sosial.

Secara *ekonomis*, mereka tidak dikenai dan tidak perlu membayar pajak. Sebab pajak hanya dibayarkan oleh rakyat biasa, musuh yang ditaklukkan, keluarga-keluarga besar yang tidak termasuk dalam lingkungan istana. Sebaliknya, mereka malahan menikmati hasil pungutan pajak, yang wajib dibayar oleh rakyat. Masyarakat umum menghormati tata *privilese* yang ditetapkan oleh penguasa, dalam hal ini raja. Seakan-akan masyarakat berjalan atas dasar *privilese*, misalnya monarki merupakan *privilese* suatu keluarga, para bangsawan memiliki *privilese-privilese*, kota-kota juga memiliki *privilese*. Hanya Revolusi Prancis yang kemudian menjungkirbalikkan mentalitas dan praksis yang selama ini digemari oleh kalangan elite dan aristokrat. Anehnya, banyak anggota hierarki gereja yang melekat erat pada kelompok ini. Konsekuensinya, para pelaku Revolusi Prancis, yang pertama-tama memerangi sistem monarki yang tidak adil dan menyengsarakan rakyat kecil, akhirnya juga mengganyang mentalitas dan pendukung sistem monarki, yang dianggap mengerem pelaksanaan trimarga utama secara murni dan tuntas, yakni *liberté, fraternité, égalité* (kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan).

Prinsip Asasi Masyarakat Kristen

Salah satu prinsip dasariah yang mengilhami absolutisme sehingga agama dapat berpengaruh dalam masyarakat adalah *lembaga harus menguasai suatu paralelisme sempurna antara tata politik-sipil-temporal dengan tata spiritual-religi-us adikodrati*. Untuk mendukung prinsip tersebut diberlakukan ketentuan berikut: semua yang dilarang atau diizinkan dalam tata keagamaan harus dilarang atau diizinkan juga dalam tata

sipil, kecuali beberapa (yang sangat jarang terjadi) kekecualian. Berikut ini diperlihatkan sejumlah contoh aplikasi dari prinsip ini (Martina, III).

Hak ilahi dari para raja. (Figgis, ²1994). Absolutisme berusaha mencari suatu dasar teoretis. Di bawah pengaruh Protestantisme (sambil menjauhkan diri dari doktrin politik Abad Pertengahan yang menjurus pada partisipasi rakyat pada kehidupan politik (Egidius Romano, Yakobus Viterbo), para penulis seperti William Barclay, Bodin, Bossuet seakan memindahkan “pengudusan” keagamaan dan privilese gereja kepada kedaulatan sipil. Jadi, hanya monarki yang merupakan bentuk sah dari setiap pemerintahan. Hak para penguasa tidak dapat dituliskan, dan sifatnya lebih luhur daripada setiap bentuk pertimbangan utilitaristik. Penguasa memiliki otoritasnya hanya dari Tuhan secara langsung. Tuhan memberikan wewenang pada penguasa dengan suatu tindakan positif yang analog dengan pemilihan paus. Oleh karena itu, raja merupakan wakil Allah di dunia, gambar Allah yang hidup, yang duduk di takhta Allah. Raja memiliki sifat di atas rata-rata kebanyakan manusia, dan tradisi yang sangat tua mengaitkannya dengan kemampuan untuk menyembuhkan beberapa penyakit. Warga negara hanya dituntut satu hal saja, yakni ketaatan (buta), suatu sikap tunduk tanpa syarat. Tentu saja, di luar dan bertentangan tuntutan itu dianggap sebagai pemberontakan: hak penguasa demi menghormati martabatnya yang transenden itu lebih unggul daripada hak warga negara untuk melindungi hidupnya.

Kesatuan politis didasarkan pada kesatuan agama. Jika kesatuan agama di Eropa Abad Pertengahan, yang telah melahirkan *respublica christiana*, telah runtuh menyusul reformasi Protestan, keterbagian agama telah menjadi definitif dengan Perdamaian Augsburg (1555), Westfalia (1648), maka kini tinggal mempersatukan agama dalam lingkungan atau wilayah setiap kerajaan. Ini berarti menyeragamkan pilihan masyarakat warga. Tidak ada pilihan! Tidak masuk akal kemungkinan ini, bahwa suatu negara secara politik utuh dan bersatu, tetapi secara agamawi

terbagi. Dikatakan berkenaan dengan hal tersebut: *un roi, une loi, une foi* (satu raja, satu hukum, satu iman). Logikanya dapat diabadikan dalam terang kalimat ini: siapa yang tidak ingin masuk dalam kerajaan Allah, tidak memiliki hak untuk mengambil bagian dalam kerajaan duniawi! Konsekuensinya, siapa yang tidak memeluk agama yang dominan, selain hak politiknya akan susut juga hak sipilnya (kebebasan untuk bertempat tinggal, hak untuk berpindah, hak berprofesi [hak atas pekerjaan], dan hak milik). Prinsip ini berlaku bagi negara-negara Katolik dan Protestan: tetapi penerapannya sangat bervariasi.

Misalnya, di Prancis sejak tahun 1598 (Maklumat Nantes ditetapkan oleh Raja Hendrik IV) hingga pencabutannya kembali atas prakarsa Louis XIV (1685) (Garrisson, 1985; Labrousse, 1990). Di Brandenburg di mana mayoritas penduduknya beragama Protestan, orang-orang Katolik memperoleh beberapa pengakuan (sah secara legal). Jadi, ada garansi yuridis bagi warga Katolik untuk hidup dalam damai, termasuk di dalamnya melaksanakan ketentuan-ketentuan di bidang ritual keagamaan. Di Inggris dan Irlandia, sebaliknya, orang Katolik hingga 1793 tetap tidak mempunyai hak berpolitik; dan hak-hak sipil mereka dikebiri oleh para penguasa sayap Inggris, yang *notabene* Anglikan, yang memusuhi kekuasaan politis Takhta Suci (Roma).

Katolik, Agama Negara. Negara yang absolut mengakui secara resmi agama Katolik sebagai satu-satunya yang benar, dan gereja sebagai suatu masyarakat yang berdaulat. Pengakuan resmi dan hubungan erat antara kesatuan politis dan gereja memengaruhi munculnya pandangan bahwa agama Katolik dan kepentingannya berhubungan dengan interes negara. Jadi, *takhta dan altar berhubungan satu-sama-lain*, dan keduanya menjadi tanda (simbol) kekuasaan, yang meliputi perkara-perkara dunia (sekuler) dan surga (religi). Dalam politik ini terjadi amalgasi antara kekuasaan sipil dan kekuasaan religi. Penetapan-penetapan keagamaan dengan sangat mudah dinyatakan sebagai ketentuan-ketentuan sipil,

dan demikian juga sebaliknya. Semua warga masyarakat dalam wilayah kekuasaan tertentu berkewajiban mengikuti begitu saja ketentuan agama. Mungkin akan lebih mudah menunjukkan contoh yang sangat jelas dewasa ini dengan gagasan mengenai ketentuan-ketentuan *Syariah* Kristen yang pernah diusulkan di beberapa wilayah yang penduduknya beragama Kristen. Sesungguhnya, usulan itu dimaksudkan untuk meneladan apa yang diberlakukan di Serambi Mekah, Aceh Darusalam. Di sini negara ditelikung dan pemerintah tidak berkuasa menghalangi syariah-syariah yang bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan yang lebih tinggi, apalagi di sana ada kepentingan politik yang diperjuangkan di samping otonomi daerah yang sesungguhnya salah urus. (*The Jakarta Post*, Kamis-Jumat, 6-7 Februari 2014, dengan judul *Aceh mulls sharia for non-Muslims*).

Akibatnya, raja merasa wajib *mempertahankan dan memajukan gereja*, negara dan gereja mempunyai satu tujuan yang sama: kesejahteraan umum (*bonum commune*). Mereka berusaha menciptakan dan mempertahankan struktur yang memudahkan para warga melaksanakan kewajiban keagamaan. Penguasa membela gereja sambil menghalangi eksistensi dan penyebarluasan pengaruh bidah; melarang beredarnya buku-buku yang berlawanan dengan kaidah gerejawi. Melawan gereja berarti merendahkan kekayaan spiritual bangsa; dan itu berarti pula tindak melawan raja, yang identik dengan penghinaan terhadap Tuhan.

Hukum sipil itu selaras dengan hukum kanonik. Negara tidak saja memungut inspirasi perundang-undangannya dari doktrin dan praksis gereja yang tertuang secara sangat jelas dan terukur dalam rumusan-rumusan kanonik, tetapi juga mengakui hukum gereja (kanonik) sebagai ketentuan yang berlaku secara mengikat. Apa saja yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, rambu-rambu mana yang dipasang dalam rangka hidup menggereja juga berlaku sederajat dan sejalan dalam tata tertib – kedisiplinan masyarakat sipil. Dalam hal ini tidak dibedakan antara

hal-hal yang mengingat setiap pribadi, seperti hak-hak asasi manusia, dengan hal-hal yang berlaku komunal dan sosial. Kesatuan antara "hukum religi dan hukum sipil" memperlihatkan arus mentalitas tradisional, konservatif, dan cenderung primitif, sebagaimana terjadi dalam masyarakat tertutup dan terisolasi yang menampik dengan terang-terangan alam pikiran yang terbuka. Mungkin secara positif kita dapat merumuskannya bahwa zaman keterbukaan yang dicirikan oleh kebebasan dan sikap kritis belum tiba. Sebab pada zaman itu –lebih dari tiga ratus tahun yang lalu– jika lembaga gerejawi menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar hukum kanonik, maka negaralah yang akan menjamin pelaksanaan eksekusi. Sering kali negara membuat undang-undang sipil yang sangat analog dengan hukum gereja. Misalnya, kompetensi gereja atas perkawinan; profesi religius pun diakui oleh negara, bagaimana sikap negara terhadap pelanggaran-pelanggaran yang lebih banyak berciri corak keagamaan daripada kenegaraan.

Penggunaan kekuasaan oleh otoritas gereja. Para uskup dan pemimpin tarekat mempunyai kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah. Mereka itu, hierarki, dalam banyak kasus berlari ke "lengan sekular". Sebab dalam persetujuan dengan gereja, negara berkewajiban untuk membantu jika gereja menghadapi pelbagai kasus. Seturut tradisi (Abad Pertengahan) hukum "kanonik", uskup mempunyai tugas menjaga keutuhan iman dan moral. Bagaimana tugas ini dapat dilaksanakan jika tidak dengan menggunakan kekuasaan dan sarana yang ditawarkan negara? Tetapi ini mengandaikan adanya korps "polisi" yang langsung berada di bawah kekuasaan hierarki, yang berbeda dengan korps polisi negara. Selain itu, gereja juga mempunyai penjara untuk para nabi kegerejaan. Inkuisisi, kuria keuskupan, biara laki-laki dan biara perempuan masing-masing mempunyai penjara, yang cukup sering berfungsi terutama bagi mereka yang terang-terangan terbukti

bersalah, dan melanggar ketentuan-ketentuan baku kebiaraan, misalnya yang berhubungan dengan profesi religius.

Organisasi Kerja. Demi profesinya sendiri setiap pekerja wajib untuk bergabung dalam korporasi, yang memiliki ketentuannya sendiri. Korporasi ini selain menggalang kesatuan orang-orang *senasib* juga mempunyai makna ekonomis dan keagamaan. Sebab di sana bisa diatasi, sekurang-kurangnya dibatasi semangat bersaing yang tidak saling menguntungkan. Di sana pula ditetapkan harga baku dan syarat pekerjaan, serta jaminan keaslian produksi. Korporasi yang khas Abad Pertengahan ini, kemudian menjadi suatu *kasta* yang tertutup, menyibukkan diri terutama dengan kepentingan para anggotanya sendiri. Di sini praktik pembaruan tidak dimungkinkan (misalnya persaingan bebas). Tetapi kita tidak boleh melupakan aspek lain dari korporasi ini, yakni aspek keagamaan-kultural-karitatif. Sebab korporasi ini dibangun antara lain karena kesatuan iman; para anggotanya juga wajib ikut dalam perayaan di komunitas-komunitas religius (pelayanan prosesi, mendengarkan khotbah, melayat, dan lain sebagainya). Setiap korporasi memiliki seorang kapelan, yang digaji oleh uskup, dan yang menjaga tertib serta perilaku moral para anggota korporasi.

Pada Gereja diakui monopoli karya, ajaran, dan kepemimpinan sejauh gereja menghadirkan suatu ciri kudus, atau dalam kaitannya dengan yang kudus. Negara hingga abad ke-18 tidak mempunyai minat pada pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tetap ditangani tarekat religius, seperti Serikat Jesus, Scopoli, Barnabiti, Benediktin, dengan pendirian kolese berikut asrama-asrama. Pendidikan perempuan kurang berkembang pada zaman itu. Para gadis dari keluarga bangsawan biasanya disekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh biara-biara.

Imunitas gereja. Artinya, gereja diluputkan dari tuntutan undang-undang pada umumnya, baik yang menyangkut tempat, orang,

maupun benda-benda milik gereja. Imunitas itu meliputi: *Kekebalan Real*. Harta benda gereja tidak dikenai pajak. Dengan demikian, selain dieliminasi setiap bahaya penyusutannya, gereja juga dimungkinkan untuk memperluas pelayanan sosial, yang memang dikhususkan bagi gereja. Harta benda tidak bergerak juga tidak dapat dipersengketakan di meja hijau. *Kekebalan lokal*. Undang-undang pengasingan dikurangi. Gedung-gedung gereja dan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan gereja menjadi tempat pengasingan (perlindungan). Buronan dapat melupakan diri dari pengejaran pihak yang berwajib, jika dia berlindung di gereja atau biara. *Kekebalan Pribadi*. Para klerus tidak harus mengikuti wajib militer; tidak dapat diseret ke meja hijau. Hanya forum para klerus dapat menghakimi kasus yang ditimbulkan oleh para klerus.

Semua bentuk imunitas ini menciptakan masalah yang sulit dipecahkan karena sudah menjalar bagaikan kanker ganas. Tidak satu pihak pun dalam negara dapat mengganggu gugat otoritas gereja. Jika sampai terjadi bahwa otoritas dan aktivitas gereja dikontrol oleh otoritas sipil, maka akan muncul *gereja nasional*. Ini berarti, membendung pelaksanaan misi gereja. Privilese ini, secara *de facto*, menimbulkan masalah sterilitas dan tidak-terjamah-oleh-hukum di kalangan klerus. Sementara itu, pola global semacam ini kian berurat berakar dalam tata pelaksanaan hidup menggereja. Kasus berikut mengingatkan kita akan pelecehan privilese sekaligus ada otoritas sipil yang tidak tahu-menahu terhadap otoritas gereja.

Konflik Paulus V dengan Republik Venezia, yang menolak menyerahkan dua imam yang ditangkap karena tuduhan melakukan tindak kriminal. Pada April 1606, Paus Paulus V mengeluarkan interdik atas Venezia. Interdik berarti hukuman gerejawi yang melarang orang untuk mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi atau ibadat resmi apa pun, serta menerima/menerimakan sakramen-sakramen dan *sakramentalia*. Kalau interdik dijatuhkan sebagai hukuman, orang harus

dicegah menerima atau menerimakan sakramen-sakramen dan jika tidak bisa, perayaan harus dihentikan. Orang seperti ini tidak dapat mengambil tindakan apa pun sebagai pejabat gereja. Republik Venezia menerima tantangan Roma dan memerintahkan kepada dua imam itu untuk tidak mengikuti petunjuk Roma. Eropa saat itu mengakui Venezia sebagai negara sekuler “unggulan” pada zaman modern. Situasi ini akhir-akhirnya diatasi dengan perantaraan Hendrik V, Raja Prancis. Bapa Suci menarik kembali interdik. Republik menyerahkan dua imam itu tidak kepada Sri Paus melainkan kepada Prancis (1607).

Pada prinsipnya, kemenangan ada pada pihak Venezia yang tidak sudi mencabut disposisinya dan tidak merendah di hadapan paus, yang mau tidak mau mengakui kekuasaan Dewan *Klerus* di Venezia. Eksistensi Dewan *Klerus* ini jelas merupakan tamparan ke wajah otoritas tertinggi gereja di depan umum. Pendeknya, privilese itu hanya memperdalam dan memperlebar jurang pemisah antara gereja dan negara, terutama antara gereja dan dunia modern pada umumnya. Konflik yang muncul itu ternyata disebabkan oleh kesalahan paus yang hendak mempertahankan kekuasaan atas Eropa, dan tidak mau menyesuaikan diri dengan situasi dan tuntutan yang baru, yakni lahirnya negara-negara baru berikut kedaulatan-kedaulatan mereka.

Yurisdiksionalisme

Lembaga negara berperan sebagai *polisi gereja*. Dalam historiografi modern istilah “polisi gereja” disebut juga “lengan sekuler gereja”. Sebab gereja dipahami pertama-tama sebagai institusi rohani, yang kemampuan menjangkau hal-hal duniawi sangat terbatas. Itulah sebabnya, gereja membutuhkan lembaga lain, yakni negara, yang memiliki aparat dan lembaga hukum yang berkekuatan otoritatif, sehingga dapat memaksakan kebijakan dengan ancaman dan hukuman yang pasti bagi mereka yang melanggar ketentuan hidup bersama. Posisi yang pegang erat negara

di hadapan lembaga gereja harus dibayar mahal oleh gereja, yakni *intervensi polisi itu ternyata disertai kontrol ketat dari pihak negara terhadap hampir seluruh aktivitas gereja*. Dua unsur dari sistem, juga seandainya di antara keduanya terjadi antitesis, mengembangkan diri secara paralel dalam kurun waktu yang bersamaan. Unsur pertama (bantuan negara) itu berlangsung selama abad ke-17, sementara pada abad ke-18 terjadi unsur kedua yang disebut *subordinasi gereja pada negara*.

Teori-teori tata negara yang mengatakan adanya keterkaitan yang bersifat niscaya antara lembaga agama (baca: gereja) dan lembaga negara menegaskan bahwa negara memiliki hak prerogatif dalam hal-hal kegerejaan, berkembang secara berangsur-angsur setelah skisma Barat dan sanksi pragmatis dari Bourges (1438), dari akhir Abad Pertengahan hingga seluruh abad ke-18, yang diutarakan oleh Petrus Pithoeus atau Pierre Pithou (1539-1596) dalam *Les libertés de l'Église gallicane* (1594); Pierre De Marca dalam *De concordia sacerdoti et imperii* (1641) di Prancis; Zeger Bernard van Espen (1646-1728) dalam *Jus Ecclesiasticum Universum*, 2 vols. (1700) di Louvain; Johann Nikolaus von Hontheim (1701-1790), yang disebut juga Yustinus Febronius, *De statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis* (1763) di Jerman; Paolo Sarpi (1552-1623) dalam *Historia del Concilio Tridentino* (1619) di Italia; Anton Pereira, *Doctrina veteris Ecclesiae de suprema etiam in clericis potestate* (1766) di Portugal. Akan tetapi, yurisdiksionalisme menemukan ungkapan yang paling matang dan sistematis dalam *Instituitorum Jurisprudentiae Ecclesiasticae*, yang diredaksikan di Wina (1765), Austria, oleh Paulus Joseph Ritter von Riegger (1705-1775). Buku ini dalam tahun 2012 diterbitkan ulang dalam bahasa Latin oleh Penerbit Nabu Press.



Paulus Joseph Ritter von Riegger (1705-1775), seorang ahli hukum berkebangsaan Austria. Beliau pernah menjadi profesor di Universitas Innsbruck dan Wina.

Karya Riegger tersebut ditetapkan sebagai teks resmi di seminari-seminari pada zamannya. Riegger merumuskan suatu sistem: para negarawan pada zaman itu berusaha mengaplikasikan dengan mempertimbangkan waktu, situasi, kondisi yang sesuai dengan masing-masing negara. Pada dasarnya pandangan Riegger merupakan suatu abstraksi. Aplikasi integral sistem ini diupayakan di Austria di bawah pemerintahan Yosep II (1765-1790). Ada beberapa hak negara dalam kaitannya dengan gereja. Hak-hak prerogatif negara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Hak Advokasi dan Perlindungan (*Jus advocacionis et protectionis*). Negara menjamin gereja agar bersih dari segala bentuk heretik (pengajaran sesat), skisma (perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan tata tertib dan disiplin). Untuk itu, negara berketetapan untuk mendorong, manganjurkan, dan menasihatkan hal-hal yang baik, luhur, dan mulia yang diajarkan oleh gereja, agar dilaksanakan pula dengan setia oleh semua warga negara yang sekaligus mengaku anggota gereja. Negara dalam hal ini berkepentingan menjaga agar situasi damai, utuh, satu tidak diganggu gugat oleh pelbagai intrik dan gerakan yang pada dasarnya hendak mengedepankan alternatif dari apa yang sudah dan

sedang ada. Sebab, kedamaian warga gereja identik dengan kedamaian warga negara. Pada kurun waktu itu belum terpikirkan eksistensi multikulturalisme yang berarti multiagama. Dalam kenyataannya Eropa, terutama kekaisaran Habsburg (Parker, 1990, 158-169), masih Kristen, yang dalam konteks ini tidak dibedakan antara Protestan dan Katolik. Prinsip ini juga disebut *custos et vindex canonum*, artinya penjaga dan kanon yang setia.

Hak Pembaruan (*Jus reformandi*). Hak ini dalam praktiknya di lapangan diberikan kepada para bangsawan yang menjadi pendukung utama gereja atau paguyuban umat beriman setempat. Hak ini memberikan kewenangan dan kemudahan bagi para bangsawan, yang merupakan "kroni" atau "keluarga" para pemegang kekuasaan negara yang bercorak monarki, untuk melakukan pembenahan organisasi dan aktivitas gereja. Pembenahan atau lebih tepat *reorganisasi* gereja selalu dapat dilakukan jika menurut pertimbangan (dalam praktiknya setelah mendengarkan sejumlah masukan) pembenahan itu perlu dan dibutuhkan. Ini semua demi menghindarkan, bahkan menghilangkan, penyalahgunaan yang kemungkinan telah terjadi.

Dengan pembenahan itu –yang terjadi dari luar institusi gereja– diharapkan pelayanan komunitas gereja lebih efektif. Di sini, inferioritas gereja terasa sangat nyata di hadapan negara yang memiliki segala kekuasaan. Negara tidak mengenal (lagi) dimensi sakral dari gereja, apalagi gereja dalam praktiknya pernah sangat lugas dan sarat dengan urusan-urusan duniawi dengan bentuk-bentuk sakral, tetapi ujung-ujungnya adalah *materi*. Dalam konteks ini, negara berperan menentukan; ia bagaikan hakim agung yang berada di atas segala-galanya, dan tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan mana pun juga. Negara dan kekuasaannya mengesankan tidak terbatas, sebab tidak ada lembaga yang mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara.

Hak Supervisi (*jus supremae inspectionis*). Negara memiliki kewenangan untuk melakukan peninjauan, pengawasan, dan tentu saja pertanggungjawaban atas apa saja yang dilakukan oleh himpunan umat beriman, yakni gereja. Negara dapat membatasi kebebasan dalam hubungan antara entitas lokal gereja dan Takhta Suci, mengawasi sinode antarkeuskupan, bahkan konsili sekalipun, termasuk di dalamnya karya-karya misioner, mendirikan entitas gereja yang baru entah sekuler entah regular, menghapus entitas yang dipandang tidak perlu, mengawasi pengajaran di sekolah-sekolah negeri dan swasta (religius), materi yang diajarkan di sekolah pendidikan calon imam, acara-acara komunitas di biara-biara, melihat kembali administrasi properti (hak milik barang-barang) gereja. Dalam negara absolut, calon anggota tarekat religius (ordo dan kongregasi, baik laki-laki maupun perempuan) perlu membekali diri dengan Surat Kelakuan Baik dari otoritas sipil. [Hal ini mengingatkan kita akan praksis di Indonesia, terutama pada rezim Orde Baru, bahwasanya segala bentuk administrasi yang berhubungan dengan mutasi (perpindahan), lamaran kerja, masuk lembaga-lembaga keagamaan sekali pun diperlukan Surat Bebas G30 S/PKI, yang kemudian diperlunak menjadi Surat Berkelakuan Baik dari kantor polisi terdekat. Rupanya trauma dan sentimen penguasa negara terhadap PKI begitu tinggi, sehingga semua pintu tertutup bagi warga negara yang berbau PKI dan ada stigma PKI. Diskriminasi ini dibiarkan begitu saja sampai dengan pemerintahan pascareformasi, kendati format "kontrol" pemerintah atas sisa-sisa itu dibiarkan begitu saja, tanpa upaya pemulihan. Sikap ini hendak menegaskan bahwa lembaga gereja sungguh-sungguh berada dalam kekuasaan negara]. Artinya, gereja harus mengabdikan dan melayani kepentingan yang lebih luas, yang kini dipegang oleh pemerintah.



Kardinal Richelieu
(Armand Jean du Plessis)

Selain *Jus nominandi*, yakni negara berhak menominasi uskup, abas (pemimpin pertapaan untuk laki-laki) atau abdis (pemimpin pertapaan untuk perempuan), para fungsionaris gereja lainnya (di Prancis, misalnya, dengan konkordat yang dibuat tahun 1516 antara Paus Leo X dan Fransiskus I dinyatakan: Raja Prancis berhak menominasi semua uskup [sekitar 90-an], semua abas [sekitar 50-an] dan semua prior di kerajaan Prancis. Konkordat ini diperbarui oleh Napoleon dalam tahun 1801. Pada hakikatnya, dari tahun 1516 hingga 1905, dari konkordat Leo X hingga UU separasi gereja dan negara, semua uskup Prancis dinominasikan oleh negara, bukan oleh gereja. Peran Sri Paus terbatas saja, misalnya memberi instruksi kanonik pada para calon yang sudah dipilih); juga *Jus exclusivae*, yang berkuasa dapat mengecualikan seseorang yang tidak layak dari tugas yang sudah ditentukan. Aplikasi yang paling mencolok terjadi dalam konklaf, yakni dengan veto terhadap calon. Veto dapat dilaksanakan hanya satu kali di dalam konklaf, yakni sebelum pemilihan. Hal ini terjadi: dua kali pada abad ke-17, tiga kali pada abad ke-18, dua kali pada abad ke-19, dan masih satu kali pada konklaf (tahun 1930) melawan Kardinal Rampolla. Veto itu berasal dari Austria, yang menegaskan bahwa mantan sekretaris negara Leo XIII itu terlalu menaruh simpati pada Prancis. Paus Pius X (Januari 1904) melarang dengan ancaman *Latae sententiae* pada otoritas awam

yang mencampuri urusan pemilihan paus. Norma ini diteguhkan oleh Paulus VI tentang pemilihan paus. Veto ini merupakan senjata terakhir, dan hanya digunakan pada saat menentukan: hanya karena ketakutan beberapa kardinal yang tidak memperoleh dukungan Prancis, Spanyol, Austria, cukuplah untuk membuat para pemilih untuk menyangkal hak suara mereka pada beberapa rekan, juga seandainya untuk aspek-aspek lainnya kardinal itu sangat mampu.

... *Jus placeti et exequatur*. Hak-hak ini mengebawahkan semua tindakan gereja (Roma dan Kuria Roma) supaya ada kepastian bahwa gereja tidak melawan otoritas negara. Praktik ini wajib, juga untuk hal-hal yang menyangkut definisi dogma, yurisdiksi pengakuan dosa, pengutusan para pengkhotbah asing, jam pelaksanaan upacara. Jadi, hampir semua: termasuk merayakan misa votif, makan daging pada hari-hari pantang. *Exequatur* dan *placet* tetap tinggal sebagai senjata andal dari yurisdiksionalisme karena sifatnya yang elastis. Para penguasa tidak pernah melepaskannya, dan Roma dipaksa menerima kenyataan itu.

... *Jus circa temporalia officii* yang mengizinkan negara untuk menyita apa yang dimiliki klerus jika klerus tersebut ternyata tidak setia pada pengemban monarki. Contohnya, jika seorang pastor paroki lebih taat pada paus daripada kepada negara (baca: pemerintah yang berkuasa), maka ia akan kehilangan semua yang perlu untuk kehidupannya. Tegasnya, harta miliknya disita oleh dan untuk negara. *Jus appellationis* mengizinkan imam atau jemaat beriman untuk minta bantuan pada negara melawan otoritas kegerejaan. Jika uskup memecat imam yang secara moral busuk dan pemberontak; atau jika pastor tidak mau mengabsolusi dosa beberapa anggota gereja, selalu ada kemungkinan, baik pada kasus pertama maupun kedua, mereka minta bantuan negara agar membela kepentingan mereka.

... *Jus dominii eminentis* mengizinkan negara menarik pajak terhadap harta benda gereja dan mengadministrasikannya, selama *sedes vacante*

(takhta kosong). *Jus patronatus* dalam hal ini negara dan beberapa keluarga terpendang (bangsawan dan pangeran) berhak menominasi abas, abdis, rektor-rector gereja, dan rumah-rumah biara sebagai pelindung.

Sekularisasi Memasuki Lembaga Gereja

Dari penelusuran mengenai hak istimewa atau privilese gereja dan yurisdiksionalisme negara, kita dapat mengemukakan dua aspek (negatif dan positif). Aspek-aspek ini dimunculkan hanya sejauh menyangkut peristiwa dalam gereja dan gagasan yang melatarbelakanginya.

Aspek Positif

Keikutsertaan massa dalam sakramen-sakramen gereja pada abad ke-16 dan ke-17 relatif tinggi (Delumeau, 543). Boleh dikatakan hampir semua jemaat menerima sakramen-sakramen sekurang-kurangnya pada hari Paskah. Fransiskus de Sales menasihatkan untuk menerima komuni mingguan, dan dalam beberapa kasus, bahkan dinasihatkan agar menerimanya setiap hari. Khususnya di Italia, berkembang subur adorasi pada Sakramen Mahakudus, yang ditakhtakan di setiap gereja dua hari berturut-turut (dalam seminggu); di banyak gereja bahkan adorasi ini berlangsung sepanjang minggu. Hal yang lebih umum adalah devosi kepada Maria, misa khusus pada Mei dan Oktober. Bulan Mei berkenaan dengan beberapa penampakan Maria, berikut pesan-pesan sucinya. Oktober mengingatkan akan ketetapan yang dimaklumkan oleh Paus Pius V, 1573. Paus merasa perlu berterima kasih kepada perlindungan Bunda Perawan yang melindungi pasukan Liga Kristen: Spanyol dan Venezia dalam pertempuran melawan orang-orang Islam (Turki). Liga ini dibantu oleh pasukan kepausan dan Genova. Pertempuran di Lepanto, 7 Oktober 1571, dimenangkan oleh Liga Kristiani, sehingga gerak maju laskar Islam yang sudah menguasai Eropa Timur dapat dibendung, bahkan dipukul mundur. Lepanto terletak di Teluk Korintus, yang pada

zaman sebelumnya disebut juga Naupactos. Ucapan terima kasih pada Bunda Maria ini ditetapkan sebagai pesta (ratu) Rosari.

Orang-orang kudus yang sangat heroik pun tidak kurang: Theresia Avilla, Yohanes Salib, Leonardus Port Maurice, Paulus Salib, Clemens Maria Hofbauer, Yohanes Baptista de Rossi, Vincentius de Paul, Fransiskus de Sales, Beato Innocentius XI, Gerardus Maiella dan Benediktus Yusuf Labre, Maria Margareta Alacoque (+ 1690), Yohanes Eudes (+ 1680), dan lain sebagainya. Dinamika tarekat hidup bakti diperlihatkan dengan munculnya tarekat religius baru, seperti CM, OCSO, CSSR, CP.

Manifestasi kultur zaman barok mengilhami seni Kristiani. Putra-putra gereja menampilkan kecakapan mereka di bidang seni, arsitektur, dan susastra: Lopez de Vega, Calderón de la Barca, Miguel Cervantes, Juan de Herrera, Greco, Velázquez, Murillo, Rubens, van Dyck. Pada parodian kedua abad ke-17 di Prancis berkembang susastra profan, tetapi di sana pula muncul penulis-penulis Kristiani yang ulung, seperti Bossuet, Bérulle. Roma melahirkan Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Sang Komposer Giovanni Pierluigi da Palestrina.



Theresia Avila, Bernadette Soubirous, Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini

Devosi kepada Hati Kudus Yesus, yang sudah ditumbuhkan dan digemari pada Abad Pertengahan oleh para santo, seperti Gertrudis dan Bernardus Clairvaux, dan kini mendapat daya dorong yang baru berkat Yohanes Eudes, Margaretha Maria Alacoque, Claudius de la Colombière.



St. Gertrudis & St. Paulus Salib

Gereja menjadi poros hidup sehari-hari. Pesta-pesta gerejawi menjadi sarana katekese dan pendalaman (pengetahuan) iman. Khotbah-khotbah populer dan kerakyatan digemari orang dengan pengkhotbah ulung seperti Bourdaloue, Bossuet, Massilon, dan Fénelon. Italia mempunyai katekis populer: Beato Antonius Baldinucci, Fransiskus de' Geronimo, Leonardus Port Maurice, Paulus Salib, Alfonsus de Liguori. Warga gereja dengan antusias menunggu berjam-jam kedatangan para misionaris ini, demi tidak kehilangan kesempatan mendengarkan firman Tuhan dan bagaimana "orang-orang Ilahi" itu menjelaskan firman-Nya demi kehidupan sehari-hari yang mengantar pada pertobatan yang sejati.

Aspek Negatif

Patembayan (masyarakat yang sebagian terbesar beragama Kristiani) terbagi dalam dua kasta. *Sekelompok kecil berprivilese*. Mereka ini secara ekonomis mapan, tetapi sering diganduli sikap hidup amoral dan skeptisisme yang kian besar (khususnya abad ke-18) dan seakan-akan mempersubur sikap antiklerikalisme; dan *massa yang miskin-melarat* yang dibebani oleh kesulitan-kesulitan hidup yang sepertinya sengaja dibuat oleh orang-orang yang mencari keuntungan entah dengan

mengatasnamakan kuasa adikodrati entah sebagai jalan menuju pemurnian hidup yang sementara ini.

Di hadapan situasi masyarakat yang kaya, yang percaya pada diri sendiri, yang kurang peka pada situasi masyarakat serta berkembangnya *pauperisme*, gereja tampak mandul dalam misi spiritualnya. Gereja tidak lincah karena terlalu disarati oleh materi. Para paus dan uskup menikmati privilese, mendirikan istana-istana tempat tinggal mereka. Para hamba jemaat ini berpakaian serba anggun, sebaliknya rasul-rasul Kristus sejati tetap telanjang.

Gereja cenderung *menerapkan otoritasnya* untuk mengatur kehidupan jemaat. Ini merupakan salah satu efek negatif Konsili Trento, yakni gereja Katolik terlalu berlebihan dalam menetapkan dan membenamkan diri sebagai institusi yuridis dan otoritatif, sehingga kurang menampilkan, bahkan menenggelamkan dimensi karismatis. Misalnya, dalam eklesiologinya yang terlalu menekankan aspek Anti-Protestan: struktur hierarki; "gereja sebagai institusi yang tampak seperti Republik Venezia", sebagaimana diyakini oleh Robertus Bellarminus; privilese yang melindungi para petugas dan hierarki gereja. Kasus Galileo juga meletus pada zaman ini (Coyne-Heller, 1985, 15 – 110). Pastor paroki mengontrol umatnya dalam pelaksanaan ibadat, misalnya pada hari Paskah, jemaat harus menyerahkan kartu yang sudah dibagikan selama masa puasa. Kartu itu memuat keterangan tentang "kerajinan" pemegang kartu dalam tertib peribadatan. Jika tidak rajin ia mendapat sanksi, dan paling berat ia dapat dibawa ke pengadilan uskup dan dijatuhi hukuman, misalnya penundaan perkawinan, ekskomunikasi, bahkan hukuman penjara.

Munculnya *religiositas populer*. Massa yang merayakan sakramen dapat dikategorikan sebagai tanda religiositas, tetapi tanda ini tidak selalu mengungkapkan substansi sesungguhnya. Artinya, tanda dapat bersifat *artifisial* dan *superfisial*. Misalnya, banyak orang berdevosi, tetapi semangat devosionalnya tidak memengaruhi mutu moralitasnya. Orang

dapat tenggelam dalam arus massa, tetapi tidak memiliki keyakinan pribadi. Dalam arti ini, sebenarnya gereja dan penghayatan iman yang benar tidak jauh berbeda dengan mentalitas Abad Pertengahan (Brooke, 1985; Delumeau, 1986).

Catatan Akhir

Ada sejumlah penegasan yang dapat kita pelajari dari dinamika historis dalam kurun waktu ini, seperti pendakuan atau klaim para penguasa negara (kerajaan) atas kekuasaan yang berciri-corak ilahi, munculnya kesatuan politis di suatu negara yang didasarkan pada kesatuan agama, penetapan politis yang menyatakan bahwa agama Katolik sebagai agama negara, beban yang ditanggungkan pada negara adalah kewajiban "raja" untuk membela serta memajukan agama (dan kepentingannya), usaha nyata untuk mengharmonisasikan antara hukum dan perundang-undangan sipil dengan hukum kanonik (hukum gereja), lembaga gereja memonopoli pendidikan dan penyuluhan, dan sejumlah lembaga atau tempat serta pribadi memperoleh kekebalan (imunitas), dan lain sebagainya.

Akan tetapi, dengan penegasan-penegasan tersebut (berikut implementasinya), paparan historis tentang ide ini juga memperlihatkan bahwa lembaga agama Katolik Roma sesungguhnya berada dalam (bayang-bayang) pengawasan aparat negara, dalam hal ini pemerintah yang berkuasa. Kontrol yang dilakukan oleh negara itu didasarkan pada hak-hak yang dilegitimasikan oleh "suara" hierarki gereja yang pro-negara (atas prinsip Gallikanisme) dan meliputi *circa sacra*. Pemilihan pemimpin gereja, misalnya paus, dipandang sebagai *momentum* politis, demikian juga dengan penetapan para uskup di keuskupan-keuskupan agung, yang pada prinsipnya memiliki nilai strategis dan politis. Meskipun demikian, tidak kurang usaha sejumlah pemimpin gereja untuk menggunakan sejumlah sarana demi membela kebebasan gereja.

Akhirnya, absolutisme merupakan akhir dari sebuah proses yang begitu lama, yang dimulai sejak Abad Pertengahan, dan yang dipengaruhi oleh pelbagai macam faktor, terutama pergumulan sistem monarki melawan kebangsawanan dan munculnya distingsi dalam Abad Pertengahan antara kekuasaan sipil dan kekuasaan agama. Sejak abad ke-17, raja Prancis memperlihatkan perjuangan yang ekstra keras dalam bidang ekonomi dengan mengerahkan segala cara untuk memukul kekuasaan kaum feodal dan untuk mendapatkan kembali kekuasaan seperti masa silam dalam tangan mereka. Tetapi selain itu, secara politis dan sosial para penguasa negara berikhtiar menghalalkan segala cara demi memusatkan segala kekuasaan di dalam dirinya. Untuk menyokong hal ini, perlu diciptakan mekanisme yang mereduksi bahkan meniadakan kesamaan antarkelas dan golongan. Mekanisme ini sangat kentara di dalam sistem privilese, sehingga kelompok atau golongan tertentu dalam hal ini agama/gereja mendapatkan antara lain impunitas yuridis atau kekebalan hukum, impunitas (tidak tersentuh hukum), dan bebas pajak. ****

TERIMA KASIH, REVOLUSI PRANCIS!

Death, near and seemingly inescapable, threatened the Catholic Church but God took pity ... He opened the treasury of His mercy and sent the Revolution. People saw only its horrible side; they still had to see its salutary consequences. Without it where would it be? Nothing less than this storm could have swept away the deadly fog which covered a stagnant and polluted society. The Revolution was for France the pangs of birth; for the Catholic Church it was a rebirth. (Félicité de Lamennais).

All circumstances taken together, the French Revolution is the most astonishing thing that has hitherto happened in the world. (Edmund Burke).

Ten pen quivers in the hand of the historian who takes hold of it in order to try to portray the scenes of a year (1793) which seem to have surpassed human powers of description and feeling and which future generations will hardly believe actually took place. (Wilhelm von Schirach)

Periode menjelang pecahnya Revolusi Prancis, yang ditandai dengan pemberontakan dan pengambilalihan penjara Bastille pada 14 Juli 1789, ditengarai oleh rangkaian "krisis *spirit* Eropa, terutama antara 1680 dan 1715". Revolusi Prancis (selanjutnya disingkat RP) merupakan salah satu ambang penentu sejarah gereja Katolik versi komunitas Eropa Barat. Mengapa dikatakan demikian? Bagaimana selebar kain, gereja Katolik di Prancis tercabik-tabik oleh RP, dan lebih dari itu RP yang pada mulanya

gerakan rakyat yang tidak berbau agama atau institusi gerejawi tidak memperlihatkan gejala memusuhi gereja dan komunitas beriman, tetapi seperti “arah angin itu” tiba-tiba saja berubah, yakni bersikap berseteru terhadap gereja; bahkan bagaikan angin puting beliung yang bergerak liar menerjang apa dan siapa pun yang dianggap melawannya.

Perubahan gerakan massal yang memusuhi gereja itu pada mulanya dipengaruhi oleh beberapa orang yang melihat gereja sebagai bilangan kaum mapan yang umumnya tidak menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik. Kita dapat melihat catatan yang menyatakan bahwa pada pertemuan akbar di Versailles pada 5 Januari 1789 terjadi kesepakatan antara (apa yang disebut dengan) *Third Estate* dengan kaum hierarki gereja, yang diwakili oleh *First Estate*. Bahkan ditegaskan dalam *the National Constituent Assembly* pada 23 Juni 1789, ada 4 uskup dan 149 imam Katolik yang bahu-membahu mendukung dan bergabung dalam *Third Estate* yang revolusioner. Hanya ketika gerakan massa mulai mendekati penjara Bastille dan kemudian membakar dan merusaknya, 14 Juli 1789, kepentingan religius yang ditantang oleh kaum hierarki tidak memainkan peran lagi. Akan tetapi dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama terjadi kerusuhan merata hampir di seluruh negeri. Sasaran kerusuhan itu meliputi puri-puri bangsawan, bangunan-bangunan gereja, dan biara-biara massif. Semuanya dirusak, dibakar, dan dijarah.

Pertemuan Umum (*Estates General*) sering kali mengangkat keluhan-keluhan sekitar privilese dan penyalahgunaan yang dilakukan gereja, selain itu dipertanyakan pula tentang *passion* gereja terhadap pendidikan dan persoalan karitatif. Hanya sedikit hierarki dan kaum religius yang sungguh mengharapkan dan melakukan perubahan yang signifikan.

Selama “Malam Pengorbanan” dalam pertemuan nasional, para klerus Prancis berjuang bersama bangsawan untuk menyerahkan kembali hak-hak feodal dan privilese yang selama ini mereka nikmati, kepada para petani dan kaum *borjuis* (kelas menengah). Jadi, dalam

kurun waktu sangat cepat, seluruh tata feodalistik seluruh Abad Pertengahan dalam gereja Prancis runtuh, rata tanah. Maka, pada pagi hari 5 Agustus 1789 dinyanyikan *Te Deum Laudamus*, yang menandai diberlakukannya kesamaan dan kesetaraan antarwarga negara Prancis. Praktis, penghapusan feodalisme diterima secara bulat, menghapus persepuluhan, mengangkat kepedulian pada orang miskin. Bahkan, mulai diusulkan adanya gaji untuk para klerus dari negara. Ini berarti sebagian terbesar kekayaan gereja perlu diberikan kepada negara. *The Assembly's final decision was influenced more by the specter of bankruptcy than by the ideal of secularization* (Aubert cs, VII: 20). Semua perbedaan yang menandai selama ini dalam bentuk privilese (hak istimewa) dihapus dengan konsekuensi: setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Tiga minggu kemudian, 27 Agustus 1789, hak-hak manusia dan warga negara dideklarasikan secara meriah: *Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan*. Pada artikel 10 undang-undang tersebut dinyatakan adanya jaminan kebebasan beragama dan suara hati bagi semua warga negara Prancis.



Begitu banyak anggota hierarki gereja, pemuka agama (Katolik), dan anggota jemaat beriman dibantai, hanya karena mereka "beragama Katolik". Sekitar 30.000 imam diusir dari Prancis. Gereja di Prancis pun menjadi miskin-papa karena harta kekayaan disita dan akhirnya dicaplok sebagai milik negara. Akan tetapi, berkat kebijakan ekspansionis dari beberapa pemimpin Prancis, "warisan dan kekayaan" RP akhirnya

tersebar ke pelbagai wilayah Eropa dan juga berkat dukungan politik penaklukan dengan kekuatan senjata di bawah Napoleon Bonaparte. Pengalaman gereja Eropa akan Revolusi sedemikian mendalam dan negatif sifatnya, yang oleh karena itu setelah ratusan tahun, banyak orang Katolik menolak gagasan-gagasan sosial dan politis liberal yang diasosiasikan dengan revolusi. Terlihat sangat kentara bahwa perusakan dan penghancuran yang dilakukan oleh massa itu mengalami pergeseran makna, yakni dari perusakan simbol-simbol kekuasaan (termasuk agama) keperusakan terhadap kehidupan, yang sama dengan penganiayaan.

Banyak orang menilai RP sebagai biang keladi meninggalnya Paus Pius VI, 1799, di pengasingan Valenza, serta dipenjarakannya Paus Pius VII dalam tahanan di Savona dan Fontainebleau (1808-1814). Joseph Lortz (²1962-1964) menampilkan antara lain skema dan kronologi RP. Kita di sini hanya berkepentingan untuk mencari dan menemukan makna peristiwa bersejarah itu, khususnya yang langsung berkaitan dengan gereja. Dalam rangka ulang tahun ke-200 RP, 1989, telah diterbitkan sejumlah besar buku berkenaan dengan revolusi tersebut; selain itu juga diselenggarakan pelbagai seminar atau pekan studi, dan lain sebagainya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut tampaklah sejarawan-sejarawan kenamaan yang memiliki dedikasi pada peristiwa besar yang berdampak mondial ini, antara lain F. Furet, M. Ozouf, D. Mornet, A. Soboul, J. Godechot, A. Mathiez, G. Lefebvre. Untuk itu, uraian berikut tak lain hanyalah sebuah ikhtiar untuk menjawab pertanyaan ini: Apa arti RP bagi sejarah masyarakat pada umumnya dan bagi gereja pada khususnya?



Beberapa Catatan Awal

Para sejarawan yang hidup pada parooan pertama abad ke-19, tetapi yang terutama dari sayap marxis dan sosialis seperti Jean Jaurès (1858-1914), Albert Mathiez (1874-1932), dan Georges Lefebvre (1874-1959) menganggap revolusi sebagai suatu langkah besar dalam derap sejarah dunia yang mengusung sosialisme, jika tidak malahan komunisme. Mereka masih memiliki ingatan segar akan peristiwa mengenaskan yang disebabkan RP. Selain itu, mereka terutama melihat dampak langsung yang menyakitkan, bahkan mematikan, dan oleh karena itu mereka memandang RP secara sangat negatif. Joseph de Maistre, misalnya, mengungkapkan pandangannya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa revolusioner pada tahun 1796: «Anarki, tindakan yang bodoh dan gila, bengis lagi jahat, membuang semua prinsip dan penopang budaya politik serta moral dari setiap kehidupan bermasyarakat»



Joseph de Maistre (1753-1821)

Untuk mendukung penilaiannya itu, J. de Maistre mengutip pelbagai peristiwa horor yang terjadi tahun 1792-1793 (yang dikenal sebagai tahun-tahun teror). Contohnya: pembunuhan terhadap Raja Louis XVI dan Maria Antoinette dengan gobang raksasa, yang disebut *guillotine*; raibnya para pimpinan gerakan revolusioner; hukuman mati terhadap seseorang dan eksekusi susul-menyusul; sejumlah imam Katolik dibunuh karena loyalitas dan kesetiaan pada gereja Katolik, dan lain sebagainya.

Kemudian muncul soal, apakah contoh-contoh tersebut merupakan aspek terpenting dari RP? Atau, apakah contoh-contoh itu hanyalah fenomena "kebetulan" yang sangat memilukan? (Bdk. Mezzadri, 1989).



Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen (Marie Antoinette) lahir di Wina (Austria): 1755-1793. Menjadi permaisuri Raja Louis XVI sejak usia 14 tahun. Wafat pada usia 37 tahun pada 16 Oktober 1793 di bawah pisau guilottine.

Situasi gereja Gallikan (baca: Prancis) menjelang RP tidak serba terpuji. Relasi gereja di Prancis dengan Takhta Suci diatur dalam kesepakatan yang ditelorkan dalam Konkordat 1516, yang memberikan kewenangan kepada Raja Prancis untuk mengatur perolehan dari pajak kepada para petugas gereja. Sementara itu, para hierarki gereja memiliki posisi yang terhormat dalam masyarakat dengan menikmati hak istimewa, seperti tidak membayar pajak, memiliki imunitas di depan hukum dan pengadilan. Gereja Prancis terdiri atas 135 keuskupan: hampir 50.000 imam bekerja di paroki; 15-18.000 kanonik kerja di luar paroki; 20-25.000 biarawan, dan 30-40.000 biarawati. Data dipungut dari Aubert (Aubert, VII:13). Jadi, ada sekitar seratus dua puluh ribu kaum berjabah di seluruh Prancis. Di samping koster, sakristan, anggota kor, masih ada orang-orang yang mengurus hal-hal sekuler gereja. Dari data tersebut terbayang pula gereja merupakan kekuatan ekonomis yang sangat besar. Selain itu, gereja juga memiliki gedung bangunan, perumahan, dan lahan. Di Prancis Selatan gereja memiliki 4-6% lahan. Bahkan di Brie, Picardie, Cambresis gereja memiliki lahan 20-40% luas wilayah tersebut. Diperkirakan 10% lahan Prancis dalam kekuasaan gereja, dan setiap tahun gereja memperoleh pemasukan lebih dari 100 juta

livres. Perolehan ini tidak pernah kena pajak, selain sumbangan sukarela kepada negara. Tetapi gereja juga mengadakan pelayanan-pelayanan pendidikan, panti sosial, perawatan kesehatan, terutama untuk orang-orang tidak mampu. Tambahan pula, antara tahun 1768 dan 1789, jumlah rahib di Cluny anjlok dari 671 ke 301; Fransiskan (dari pelbagai cabangnya seperti: Reformati, Rekolek, Alkantarin, Observan) dari 2385 ke 1544, Capusin dari 4937 ke 2679; dan Dominikan dari 1432 ke 1006. Terbetik informasi, kehidupan biara merosot karena penghuninya meninggalkan *klausura*, memeluk keserakahan, dan tercium di sana-sini imoralitas. Memang banyak kaum biara seperti "dipaksa" oleh kaum keluarganya dan kemudian berakibat pada praktik skandal, yang terabadikan dalam karya-karya para filsuf paling berani, misalnya Blaise Pascal (1623-1662) dengan karyanya *Provincial Letters*, sebuah karya dengan judul lengkap *Lettres écrites à un provincial*, yang ditulis dengan nama samaran Louis de Montalte, yang dimaksudkan antara lain untuk menyerang praksis relaksasi (khususnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin ordo religius, Antonio Escobar) dalam bidang moralitas. Buku tidak kurang menuai pujian, yang berasal antara lain dari Charles Perrault (1628-1703), seorang penulis puisi, (teori) susastra, mengatakan: *Segala sesuatu yang ada dalam buku ini, seperti kejernihan bahasan keagungan pemikiran, keteguhan dalam bernalar, kelurusan dalam berargumentasi.* (Ch. Perrault. *Parallèle des Anciens et des Modernes*. Paris 1693, Vol. 1, 293. Dikutip dari Wikipedia tentang Blaise Pascal, Selasa, 4 Februari 2014, pk. 14.16). Bahkan kaum biara pun mulai mengincar ladang perolehan baru, yaitu membungakan (rente) uang. Hal ini segera langsung terbaca, bahwasanya kaum biara mulai meninggalkan karya-karya pelayanan sosial-karitatif dan reksa rohani.

Hampir tidak dapat dimungkiri bahwa fanatisme (dan mengungkap dalam tindak kekerasan) nyaris selalu hadir dalam setiap revolusi. Tuturan perihal fanatisme yang muncul dalam setiap revolusi, entah

yang diinspirasi oleh ajaran agama, entah oleh prinsip-prinsip sosial politik, dapat dibandingkan dengan hasil studi Lewy (Lewy, 1974: 1-38). Bahkan fanatisme semacam itu sering kali merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan revolusi. Sangat jarang terjadi, sebuah revolusi damai berhasil tanpa menumbangkan dan tanpa memakan korban. Contoh kasus: tumbangnya kekuasaan rezim komunis di Hungaria, *people power* di Filipina. Meskipun demikian, setiap gerakan apa pun bentuk dan sifatnya perlu disesalkan, jika karenanya korban jiwa berjatuhan. Untuk membenarkan jatuhnya korban, orang sering kali berkilah bahwa tiada revolusi tanpa korban. Selain itu, makna terdalam dari revolusi sendiri hanya dapat ditemukan dalam menguji pelbagai konsekuensi yang dibawa serta. Konkretnya, manakah hasil positif dari revolusi yang mengembangkan kesejahteraan rakyat, menjunjung tinggi asas keadilan, kebebasan, serta demokrasi? Pertanyaan inilah yang diungkapkan oleh Madame de Staël terhadap Joseph de Maistre (1753-1821).



Anne Louise Germaine de Staël-Holstein (atau Madame de Staël)

Tidak seorang pun menyangkal adanya teror dan penjagalan yang dilakukan oleh kaum revolusioner. Tidak satu insan pun yang berpretensi membenarkan secara moral tindakan-tindakan teror dan penjagalan semacam itu. Orang mempertanyakan apakah penggunaan kekerasan itu sesuai dengan tujuan akhir yang hendak dicapai? Selain itu juga

dipersoalkan apakah hanya melalui jatuhnya ribuan korban akhirnya dapat dicapai kemajuan bangsa manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting, tetapi masalah hakiki tinggal pada soal ini: *Manakah konsekuensi RP?*

Sejarawan Inggris (E. Burke); Italia (Botta, Manzoni); Prancis (H. Taine) telah menegaskan secara berbeda intinya yang sama, bahwasanya di dalam revolusi selalu ada semacam diskontinuitas dengan masa lalu. Sebab revolusi (yang berhasil) biasanya mengakibatkan sesuatu (atau bahkan beberapa hal) yang baru sama sekali, yang berbeda (malahan bertolak belakang) dengan masa sebelum revolusi. Oleh karena itu, diskontinuitas itu tak mungkin menghasilkan kemajuan sejati. Pada abad ke-18 sudah terjadi evolusi gradual. Evolusi ini bergulir menuju pada suatu titik yang mengatasi mentalitas *ancien régime*. RP konon telah mematahkan proses evolutif tersebut. Tuduhan yang dilontarkan seringkali bermuara pada dua hal ini: revolusi telah membelokkan perjalanan yang normal dan damai; dan para revolusioner, dengan demikian, tidak memperhitungkan situasi aktual. Mengapa? Sebab, keduanya pada hakikatnya diinspirasi oleh prinsip-prinsip yang relatif abstrak.

Contoh berikut ini membantah tuduhan bahwa revolusi itu senantiasa menampilkan unsur diskontinuitas dari masa lalu (sebelumnya). Sebut saja revolusi yang dilakukan oleh Kaisar Joseph II dan saudaranya, Petrus Leopoldus di Kekaisaran Habsburg (Kann, 1980). Kebijakan politis-keagamaan yang mereka lakukan lebih cocok disebut reformasi daripada disebut revolusi. Sebab fokus perhatian dan sasaran mereka terutama adalah sistematisasi bidang administrasi kenegaraan dan pelayanan umum. Selain itu, *de facto*, mereka berhasil memperbarui sistem pemerintahan yang lama menjadi suatu negara modern, sentralistis dan pola birokrasi yang mendukung tata laksana pemerintahan. Revolusi ini tidak memakan korban. Berkenaan dengan korban hanya dua hal ini perlu dicatat. Revolusi damai ini merupakan upaya untuk memerangi

gerak maju para ahli nجوم. Mereka ini, bila terbukti bersalah, dikenai hukuman mati bakar. Selain itu, dihapuskannya hukuman siksa/cambuk terhadap mereka yang mencemari kebenaran ajaran gereja. Jadi, baik revolusi maupun reformasi tidaklah tiba-tiba muncul di atas panggung sejarah. Ada unsur kontinuitas dari masa sebelumnya. Ada hal-hal yang mempersiapkan kemunculannya.



Alexis de Tocqueville (1805-1859)
menulis *L'Ancien régime et la Révolution*
(1856)

Kebenaran tersebut digarisbawahi oleh Alexis de Tocqueville (Bagi Alexis de Tocqueville RP mempunyai dua tahap yang berbeda. *Pertama*, selama tahap ini orang-orang Prancis tampaknya ingin menghapuskan semua masa lalu. *Kedua*, dalam tahap ini mereka mengambil kembali sebagian dari apa yang telah mereka tinggalkan. Sebagian benang merah pemikirannya dapat juga dibaca dalam *Alexis de Tocqueville* (2005), yang menegaskan adanya kontinuitas politik Prancis sebelum dan sesudah RP (1789). Ia tidak menilai RP secara negatif, melainkan sebaliknya. Pelbagai reformasi yang mengikuti revolusi konon terbatas hanya di beberapa negara (Prancis, Kerajaan Sardegna, Republik Venezia dan Genova). Selain itu, reformasi tersebut tidak sepenuhnya, sebab masih ada ikhtiar untuk menyesuaikan bangunan lama dengan tuntutan-tuntutan yang baru, tanpa memiliki keberanian untuk menghancurkannya sama sekali untuk kemudian menciptakan sesuatu yang baru. Pada zaman itu privilese (ciri khas zaman absolutisme) hanya dibatasi, beberapa perbedaan di depan hukum ditanggalkan.

Revolusi tidak menghentikan proses yang sedang berjalan. Ia juga tidak membelokkan proses itu ke arah lain, melainkan mempercepat sampai ke suatu tujuan; membuat suatu sketsa menjadi karya yang lengkap melalui pelbagai pembenahan. Akibatnya, bangunan lama ditinggalkan dan diganti dengan bangunan baru; privilese tidak hanya dibatasi, tetapi ditiadakan; paternalisme diganti dengan kedaulatan rakyat. Konsekuensi-konsekuensi ini diungkapkan oleh Goethe ketika ia melihat pertempuran Valmy, 20 September 1792. Sementara itu, pasukan Prussia dibuat lari terbirit-birit oleh prajurit Prancis, katanya, "Di tempat ini, dari hari ini suatu zaman baru bagi sejarah dunia dimulai." Konkretnya, RP tidak hanya memodifikasi rezim politik Prancis, yakni mengganyang suatu rezim yang berkuasa secara otoriter, tetapi juga merupakan kemenangan rakyat. Suatu kemenangan cita-cita politik dan sosial yang baru, yang sejak saat itu mengilhami perjalanan banyak negara. Jadi, melalui kekerasan dan ketidakadilan, RP membuat sejarah baru. Tetapi apakah sejarah baru itu menjadi ilham bagi Kekristenan, atau hanya menghasilkan konflik yang tidak terdamaikan?

Apologi Katolik selama lebih dari seabad mengecam RP sebagai anarki dan terutama karena menganiaya gereja. Penganiayaan itu berupa hukuman mati terhadap para imam Katolik yang menolak sumpah setia pada *Konstitusi Sipil Para Klerus* (1790) (Konstitusi ini bukan saja menyeragamkan tata laksana keuskupan, tetapi juga menyerahkan kekuasaan kepada awam untuk memilih pastor paroki yang mereka inginkan, membentuk gereja Prancis menjadi gereja nasional. Hal ini berarti, mereka tidak lagi tergantung pada Roma), mendeportasikan Pius VI dan Pius VII, melarang kultus yang selama ini terjadi di dalam gereja dan menggantinya dengan kultus kepada Dewi Rasio dan kultus kepada Yang Mahatinggi. Selain itu, revolusi juga dikecam sebagai langkah apostasi (penyangkalan iman) masyarakat modern, yang dimulai dengan renaissans, berkembang dengan Protestantisme

dan *Enlightenment*. Apologia Katolik juga mengatakan bahwa prinsip-prinsip 1789 merupakan kesimpulan logis dari tesis-tesis Luther tentang kebebasan dan tentang pemisahan antara tata objektif dengan subjektif. Tambahan pula, penyangkalan terhadap perendahan diri manusia di hadapan Allah merupakan tirani dari Konvensi Nasional. Apologia ini umumnya tidak berasal dari sejarawan, hanya Antonius Rosmini yang kemudian mengemukakan makna religius yang mendalam juga dalam protes-protes antiagama dari para revolusioner. Rosmini melihat revolusi dengan mata optimistis (Rosmini, 1985, bab III).



Paus Pius VI dan Paus Pius VII kedua-duanya mengalami dampak langsung dari Revolusi Prancis. Ketika pasukan Prancis menginvasi Italia, Kardinal Chiaramonti, yang nantinya menjadi Paus Pius VII, dalam sebuah homili Hari Raya Natal menyatakan bahwa tidak ada pertentangan antara bentuk pemerintahan demokratis dan perihal menjadi seorang Katolik yang baik. Keutamaan Kristen membuat seorang demokrat yang baik, ... sama halnya bukan gagasan para filsuf melainkan Kristus ... dan tidak percaya bahwa agama Katolik menentang demokrasi.

Dalam sejarah sebenarnya tidak dikenal diskontinuitas sebagaimana disebutkan di atas, sebab *historia non facit saltus*. Artinya, sejarah itu berjalan dengan ritme sebab-akibat atau dengan mengindahkan hubungan kausal. Oleh karena itu, RP tidak merupakan sesuatu yang muncul sekonyong-konyong dan hanya merupakan tahap terakhir dari proses yang sudah ada pada abad ke-18 (misalnya: *Enlightenment* dan Reformasi Protestan).

Demikian pula revolusi tidak menghasilkan buahnya dari suatu hari ke hari yang lain. Sebab setelah Napoleon Bonaparte jatuh, dari tahun 1814-1815 hingga 1830 atau 1848, di banyak negara Eropa para pangeran kembali berkuasa dan berusaha menetapkan kembali "zaman emas masa lalu" dengan menyirnakkan tendensi-tendensi kemenangan revolusi. Dalam arti tertentu, ada upaya untuk kembali ke prinsip-prinsip rezim absolut. Namun, prinsip-prinsip 1789 pada pertengahan abad ke-19 tampak diikuti oleh para penguasa negara dan negarawan di banyak tempat.



Napoleon Bonaparte, lahir 15 Agustus 1769 dan wafat 5 Mei 1821. Ia meniti karier militer dan tampil sebagai politisi yang muncul pada bagian akhir Revolusi Prancis, dan tampil sebagai Kaisar Prancis, 1804-1815. Napoleon berhasil mengobarkan sejumlah peperangan, dan mengubah peta kekuatan politik Eropa. Sebagaimana ia jaya dalam peperangan demikian juga ia bertekuk lutut dalam peperangan di Waterloo, 18 Juni 1815, melawan Koalisi Tujuh Negara.

Konsekuensi RP

Dalam kenyataannya, RP menghancurkan sebagian besar struktur ekonomi-politik-sosial *ancien régime*. Selain itu, RP juga menebarkan dasar-dasar masyarakat baru. Masyarakat Prancis dan negara-negara yang mengambil alih gagasan positif RP telah berusaha mewujudkan secara nyata prinsip-prinsip ideal, tetapi ternyata pelaksanaannya (pada abad ke-18) berjalan lambat dan tidak secepat yang dipikirkan dan diharapkan. Privilese diganti dengan kesamaan (di depan hukum),

dan semua warga negara bertanggung jawab pada keutuhan negara, menjunjung asas-asas yang mencakup hak-hak dan kewajibannya. Otoritas mutlak digantikan dengan kedaulatan rakyat dan kebebasan.

Pada saat itu, Prancis bukan hanya negara dengan mayoritas penduduk beragama Katolik, tetapi juga dengan mekarnya ordo atau tarekat religius berikut jumlah rumah biara yang sangat besar. Roger Aubert menyatakan, pada kurun waktu itu Prancis merupakan negara yang memiliki pengaruh spiritual dan teologis yang sangat kuat, khususnya di Eropa dan Amerika Utara (Aubert, VII: 11). Agak sulit dibantah bahwa episentrum gempa yang dalam dekade-dekade pertama RP terdeteksi adalah runtuhnya struktur "kuno" gereja Katolik di sebagian terbesar negara Eropa dan secara drastis mengubah posisi gereja Katolik, terutama di Jerman dan Nederland yang diwarnai oleh Protestantisme.

Aspek Positif

Kita dapat menggarisbawahi beberapa aspek positif seperti kesamaan (kesetaraan) dan kebebasan, yang merupakan prinsip yang diproklamasikan secara meriah, 4 Agustus 1789. Sering kali dikatakan, prinsip-prinsip abadi 1789 didahului oleh deklarasi yang analog, yakni revolusi Amerika Serikat (4 Juli 1776).

1. KESETARAAN (EGALITÉ)

Deklarasi hak-hak asasi manusia, yang merupakan salah satu kristalisasi dan pepadatan dari RP, menetapkan prinsip-prinsip fundamental. Prinsip-prinsip ini pertama-tama mengenai kehidupan bernegara. Kita dapat mengamati beberapa pilihan artikel dari deklarasi tersebut:

«Semua manusia lahir dan hidup dengan bebas dan sama dalam hak (dan tanggung jawab!). Distingsi sosial tak dapat didasarkan pada kegunaan bersama» (art. 1); «Semua warga itu sama dalam seluruh

martabat, tugas, dan jabatan umum, seturut kemampuan mereka dan tentu saja distingsi kemampuan itu berasal dari tanggung jawab mereka atau kecakapan mereka» (art. 6). Sebelum deklarasi hak-hak ini (4 Agustus 1789) dinyatakan, Dewan Legislatif telah membuat dekrit tentang dicabutnya hak-hak serta privilese feodalistis yang selama ini dinikmati oleh para bangsawan.

Prinsip kesamaan ini memiliki aplikasi yang cukup luas. Di dalam masyarakat, privilese-privilese ekonomis dihapus; ditiadakannya pelbagai pajak (yang sebelumnya hanya dimanfaatkan oleh para bangsawan, dan tidak digunakan untuk mendukung biaya bagi kesejahteraan rakyat); berakhirnya diskriminasi sosial dalam tata hukum pidana (hukum tertanggal 30 Januari 1790); kebangsawanan tidak lagi diakui oleh revolusi, kendati demikian kebangsawanan itu direstorasi, dengan tidak mengaplikasikan semua privilese ekonomis dan sosial seperti masa sebelum revolusi (tentu saja prestise kebangsawanan tidak dapat dihapuskan begitu saja dalam satu dua hari); para imam tidak lagi menikmati kekebalan di hadapan hukum sipil (para *klerus* dipandang sebagai warga negara biasa seperti warga yang lain dengan hak-hak dan tanggung jawab).

Prinsip kesamaan ini juga dipraktikkan dalam hal administrasi. Dengan RP lahirlah negara modern dengan ketentuan yuridis yang berlaku di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Dihapus pula pengadilan lokal yang otonom, dan diganti dengan tiga instansi yang berafiliasi pada kekuasaan pusat (hukum tanggal 24 Agustus, 27 November, 1 Desember 1790). Di kemudian hari upaya sentralisasi dan uniformitas disempurnakan oleh Napoleon.

2. KEBEBASAN (*LIBERTÉ*)

Artikel 4 dari Deklarasi 1789 memberikan batasan tentang kebebasan sebagai berikut: kekuasaan/kemampuan untuk melakukan segala sesuatu

yang tidak merugikan orang lain. Jadi, kebebasan hanya mempunyai satu keterbatasan, yakni hormat pada kebebasan yang sama yang dimiliki orang lain. Prinsip ini berlaku pula dalam bidang politik, di mana hak ilahi seorang raja diganti dengan kedaulatan rakyat (art. 3 berbunyi: "Secara hakiki prinsip setiap kedaulatan berada dalam [kehendak] nasion"). Dari prinsip ini kemudian lahir aturan tidak tertulis bahwa raja tidak lagi menggunakan rumusan: demi rahmat Allah, melainkan demi kehendak bangsa. Penggunaan rumusan ini tentu saja untuk menunjukkan sumber kekuasaan dan kewajiban yang berasal dari tangan rakyat. Rakyat tidak terdiri atas pengikut raja (pegawai negeri, kaki tangan pemerintah), melainkan warga negara.

Kemudian, kedudukan dan peranan raja juga akan dibatasi menjadi (semata-mata) simbol kesatuan bangsa dengan kekuasaan yang sangat terbatas. Pembatasan ini didasarkan pada prinsip: Seorang raja berkewajiban memerintah, tetapi ia tidak berkewajiban memimpin. Dengan praksis ini secara bertahap terjadi peralihan dari monarki konstitusional (di mana para menteri bertanggung jawab langsung kepada pemegang tampuk pimpinan. Di sini menteri berperan sebagai pembantu raja) ke monarki parlementer (di mana para menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan wajib memperoleh kepercayaan dari para wakil rakyat).

Kini, rakyat mendapatkan jaminan untuk dapat mempertahankan diri di hadapan penilaian lembaga eksekutif (art. 7 mengatakan, 'Tak seorang pun dapat dituduh, ditangkap, atau dijadikan narapidana, jika tidak dalam kasus-kasus yang melawan hukum dan (atau) melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan').

Tidak kurang penting pula adanya pengakuan akan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers (art. 10-11: 'Setiap warga negara dapat berbicara, menulis, dan menerbitkan secara bebas ...'). Ketentuan ini

langsung mencabut pelaksanaan sensor (Konstitusi yang ditetapkan tanggal 3 September 1791).

Diakui pula kebebasan {di bidang} beragama ('Tak seorang pun harus dianiaya lantaran pandangan-pandangan dan agama-agamanya'), artikel 10. Dengan begitu, diakui secara implisit hak untuk melakukan, mempropagandakan atau memasyarakatkan (ajaran) agama. Sebab dalam hal ini berlaku prinsip berikut ini: Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Tetapi saya akan berusaha sampai kematian menjemput saya supaya Anda dapat terus berlanjut mengatakannya.

Aspek Negatif

Siapa saja yang bereaksi melawan penyalahgunaan atau penyelewengan akan mengalami kesulitan dalam menciptakan keseimbangan yang sejati. Konkretnya, revolusi yang berusaha menyingkirkan dan menghancurkan suatu rezim yang menikmati secara berlimpah ruah privilese dan berperan sebagai wasit, tidak selalu berhasil menghormati martabat manusia. Penyingkiran dan penghancuran ini merupakan sifat-sifat setiap gerakan radikal. Para pemrakarsa deklarasi melupakan sejumlah hambatan tata ekonomi dan sosial yang membelenggu kesamaan dan kebebasan setiap warga negara. Hambatan-hambatan itu menyebabkan perkembangan pribadi manusia sepenuhnya dikebiri.

Dengan kata lain, para anggota Dewan Konstituante Prancis menganggap bahwa kodrat manusia pada dirinya adalah bersih. Kodrat itu selalu siap untuk menerima kebenaran dan mengusahakan yang baik. Sikap ini sekaligus membuka pintu bagi terjadinya penyalahgunaan yang merugikan orang lain (yang notabene lemah). Dalam kenyataannya, Revolusi Industri dan Revolusi Prancis bertemu satu sama lain. Keduanya membawa ke individualisme dan pada situasi memelas kaum proletar. Sementara itu, mitos kebebasan menyebabkan suatu perkembangan paham dan praktik laikalisme, yang menjurus pada sekularisme.

Keadaan di lapangan tidak seindah di atas kertas. Ketika mulai dibahas tentang properti gereja, maka hal itu menyentuh masalah biara-biara yang umumnya tidak miskin. RP membuka kemungkinan besar bagi nasionalisasi kekayaan lembaga, dan dengan begitu menciptakan suatu gerakan sekularisasi. Bahkan di lingkungan kaum gerejawi sendiri muncul keyakinan bahwa profesi religius bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Ambillah sebuah contoh: Dekret 13 Februari 1790 melarang profesi religius, dan membubarkan semua ordo atau kongregasi yang anggota-anggotanya tidak aktif melayani bidang pendidikan dan perawatan orang sakit. Konsekuensinya kaum biara (rahib dan biarawati) memiliki alternatif: keluar dari statusnya sebagai kaum biara atau tinggal di sejumlah rumah yang bersedia menampung mereka sampai ajal tiba. Tentu, ada pemimpin-pemimpin gereja yang memprotes dekret tersebut mengingat itu bentuk intervensi sekuler yang sesungguhnya bukan wilayah sipil. Pada Agustus 1792, *the Legislative Assembly* membubarkan semua kongregasi, termasuk mereka yang melayani kaum papa.

1. PRINSIP KESAMAAN DAN INDIVIDUALISME

Agar dapat mempertahankan kesamaan dan kebebasan secara lebih baik maka semua warga negara dan negara menghapus semua perhimpunan profesional. Le Chapelier, seorang wakil rakyat dalam parlemen, menegaskan bahwa mulai saat itu masing-masing warga negara mengurus dirinya sendiri. Banyak hal tergantung pada prakarsa pribadi. Perhimpunan profesional *ala* perhimpunan di Abad Pertengahan telah ditiadakan. Jadi, setiap kontrak kerja {sekurang-kurangnya terdiri atas dua pihak} itu baik dan harus dihormati oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Dengan kata lain, perkosaan kebebasan sebaliknya terjadi dengan intervensi langsung dari pihak negara atau pemerintah untuk memaksakan kontrak kolektif entah menentukan kondisi kerja yang konkret.

Akan tetapi, prinsip kesamaan ini berarti pula telah meninggalkan kaum pekerja sendirian, tanpa perlindungan dari perhimpunan (profesional) mana pun, sehingga mereka mudah sekali menjadi mangsa empuk bagi konglomerat. Negara enggan bercampur tangan karena tindakan campur tangan itu justru berarti menyunat kebebasan. Dengan demikian, masyarakat menjadi suatu kesatuan yang menutup diri. Hal semacam ini dapat dibandingkan dengan gagasan Leibniz tentang nomaden: tanpa pintu, tanpa jendela. Masyarakat hidup dalam dirinya sendiri dan dari dirinya sendiri. Kesejahteraan sosial tampaknya menjadi kesejahteraan individu. Hasil akhirnya ialah penumpukan kekayaan dalam beberapa tangan saja dan pauperisme massa mendominasi penampilan masyarakat. Itulah yang menyebabkan lahirnya kembali perbudakan dan diskriminasi sosial. Semua ini muncul secara berangsur-angsur. Akan tetapi, kita segera dapat mengafirmasikan bahwa dalam RP ada benih-benih masalah sosial. RP berkarakter abstrak, borjuis; dan dengan kata lain, cenderung untuk tidak mengangkat proletar, tetapi membela hak-hak dan privilese kaum penguasa yang baru, kaum borjuis baru. Artinya: para penabuh gamelan diganti, tetapi musiknya tetap sama.

2. MITOS KESAMAAN DAN KEBEBASAN

Mitos kesamaan dan kebebasan merugikan golongan yang tidak memiliki dan mengakibatkan otoritas negara menghadapi krisis baru. Di samping itu juga berkembang mentalitas laikalisme, sekularisme yang menjurus ke antiklerikalisme.

Keprihatinan utama kebebasan ialah menjamin prevalensi kekuasaan legislatif atas eksekutif. Hal ini kemudian melahirkan sistem parlementer. Diskusi-diskusi di parlemen terus bergulir. Sementara itu, krisis berkelanjutan hingga menyebabkan kelabilan pemerintahan. Terjadi pula paceklik otoritas yang mampu menjamin keamanan dan

memajukan kesejahteraan umum. Juga, perkosaan terhadap hak-hak asasi kelompok minoritas oleh mayoritas, yang menyalahgunakan kedudukannya. Ada semacam diktatur mayoritas! Dari parlementarisme ini kemudian lahir kembali keinginan atas otoritas yang kuat, mapan, berwibawa, serta tangguh. Dengan kata lain, lisensi menghancurkan kebebasan dan membuka jalan bagi totalitarisme di Eropa yang terjadi dalam abad ke-18 dan ke-19.

Dampak negatif RP mengenai pula sektor kegerejaan, yakni munculnya sikap antipati terhadap para *klerus* dan lembaga yang berbau serta bersifat keagamaan. Akar sikap ini berciri 'tunggang'. Para *klerus* tidak menghayati iman Kristen secara murni dan sungguh-sungguh sebagaimana Yesus Kristus orang Nazaret dahulu memperlihatkanannya sewaktu masih hidup di wilayah Palestina. Sementara itu, para perusuh dan mereka yang menamakan diri "musuh" gereja menafsirkan secara keliru amanat-amanat (*messages*) Kekristenan. Kekristenan dianggap identik dengan perilaku dan pola kehidupan para *klerus*, bahkan sama dengan pribadi para *klerus*. Dengan demikian, ada semacam simplifikasi dan pereduksian atas makna Kekristenan. Pencampuradukan konsep dan penindasan (baca: penganiayaan) terhadap para *klerus* dan lembaga gereja ternyata tidak pernah akan sanggup mematikan Gereja Kristus.

3. KONFLIK TERBUKA ANTARA MASYARAKAT *ANCIEN RÉGIME* DAN LIBERAL

Di dalam yang pertama [*ancien régime*] di bawah "nama Kristen" tersembunyi beberapa penyalahgunaan, yang bertentangan langsung dengan semangat Injil. Di dalam yang kedua [masyarakat liberal] yang berusaha mempertahankan nilai-nilai autentik, terdapat pemahaman yang lebih baik tentang martabat manusia. Tetapi dalam waktu yang sama halnya memunculkan krisis yang mendasar atas nilai-nilai itu. Akibatnya, martabat manusia itu sendiri (selain dipertahankan juga) diancam.

Manusia perlu mengetahui bahwa dunia modern (yang didasarkan sekurang-kurangnya secara teoretis pada cita-cita kebebasan dan persamaan) lahir tidak di bawah pengaruh dan ilham gereja. Sebaliknya, dunia modern itu berada dalam kekuasaan kaum awam. Sering kali gereja belum siap menghadapi kenyataan itu dan menilainya secara negatif belaka. Sikap seperti ini muncul di sepanjang abad ke-17 dan ke-18. Contoh: sikap gereja terhadap karya Beccaria, *Dei delitti e delle pene* (1766) (*Perihal Kejahatan dan Hukuman*). Karya ini segera disambut dengan kecaman. Padahal pengarang mengedepankan gagasan tentang penghapusan penyiksaan dan hukuman mati, diskriminasi sosial di depan hukum, mendukung emansipasi sipil bangsa Yahudi, berposisi terhadap instruksi yang diwajibkan. Soal utama adalah kesalahan yang dilakukan gereja bukan terletak dalam sikap menentang naturalisme, melainkan tidak mengerti hal-hal yang mendasar.

Terjadi penyitaan harta milik gereja, November 1789 (di Prancis). Demi menyehatkan neraca perekonomian maka diputuskan untuk menyita kekayaan (material) gereja. Kebijakan ini segera diikuti oleh Jerman. Langkah Jerman ini dikenal dengan sebutan sekularisasi kekayaan gereja. Gereja di keuskupan Köln, Trier, Mainz langsung mengalami perubahan besar. Hal ini tampak jelas dari pencopotan gelar Fransiskus II: Kaisar dari Kekaisaran Romawi Kudus Bangsa Jerman (6 Agustus 1806). (Langner, 1978).

Dengan demikian, punahlah sudah suatu lembaga yang dalam abad pertengahan telah berjasa membangun masyarakat Eropa. Hilangnya gelar yang tidak sesuai lagi seperti itu berarti suatu tanda pengakuan akan situasi nyata. Berakhirnya kepangeranan gerejawi menjawab kecenderungan umum zaman modern, yakni mengarah pada distingsi dua kekuasaan. Konsekuensi bagi gereja sangat jelas: para uskup dan imam Jerman pada umumnya dari suatu posisi kaya, berkuasa, beralih

ke suatu kondisi yang lebih sederhana secara ekonomis dan sosial, tetapi dengan suatu kekayaan rohani yang mendalam dan harum.

Berkat RP gereja ditelanjangi dari kekuasaan politik, tetapi masalahnya, apakah penelanjangan ini benar-benar merupakan kerugian bagi gereja? Apakah RP dapat disyukuri lantaran telah memurnikan gereja yang telah lama berkumuh dalam kedosaan? Lalu, apakah tidak beralasan jika kita mencela RP terutama karena menelan korban jiwa baik di kalangan gereja maupun rakyat kecil yang benar-benar menghayati iman Kristen mereka? Ataukah, pandangan Rosmini itu masuk akal, yang membandingkan kekayaan-kekayaan gereja dengan persenjataan Saul yang membuat Daud tidak berdaya? (Lihat Rosmini, ⁷1985).

Revolusi Prancis, yang secara praktis berakhir dengan kekalahan di medan pertempuran Waterloo (sekitar Belgia dan Belanda), menghadirkan suatu peta yang sama sekali baru. Jatuhnya Napoleon dibaca sebagai kesempatan untuk memulihkan kembali kekuasaan lama yang diobrak-abrik oleh Napoleon pada era sebelumnya. Pada pokoknya, era Restorasi ini merupakan format lain dari gerakan Kontra-Revolusi. Tidak disangkal ide baru yang dipromosikan oleh RP dan yang sempat menyihir para era Restorasi adalah "liberalisme".

Bapa Suci Pius VII dibantu oleh sekretaris negara yang sangat brilian, yakni Consalvi dan praktis aktivitas sekretaris negara ini menentukan sejarah gereja dalam paruhan pertama abad ke-19 (Jedin eds., VII, 83. Ercole Consalvi, 1757-1824) merupakan figur prelat yang bukan imam, sebab ia baru menjadi seorang imam pada tahun 1822. Itu berarti hanya dua tahun sebelum beliau wafat. Hidup Consalvi memberi kesan bahwa dirinya diabdikan sepenuhnya pada gereja Katolik. Pada tahun 1799 ia ditunjuk sebagai sekretaris konklaf yang menghasilkan Pius VII, lalu ia dijadikan pro-sekretaris negara, dan pada 11 Agustus 1800 dia dijadikan Kardinal sekaligus sekretaris negara. Dengan dukungan lahirnya kembali gerakan religius yang bermunculan di pelbagai negara, Paus Pius VII

meletakkan dasar yang kuat bagi kebangkitan kembali secara cepat gereja Katolik. "The effort of Pius VII and his successor Leo XII toward the reorganization of the Church was the prerequisite for the revival of Catholic vitality." (Jedin eds., VII, 83)

Catatan Akhir

Ada baiknya orang berpandangan bahwa RP tidak muncul pertama-tama sebagai gerakan memusuhi gereja. Sebaliknya, pada awal mula banyak imam yang menggabungkan diri dengan *Tiers état* (sejumlah biarawan malahan menjadi wakilnya). Mereka itu kemudian berusaha sedapat mungkin melepaskan privilese sosial ekonomi (Agustus 1789), menerima Konstitusi Sipil Kaum *Klerus* (*the Civil Constitution of the Clergy*).

Undang-Undang ini lolos pada 12 Juli 1790, yang memuat tiga perubahan hakiki. *Pertama*, jumlah dioses dikurangi menjadi 83, dan batas-batasnya harus dibuat sama sebagaimana batas-batas departemen. Ini berarti reduksi besar-besaran, termasuk di dalamnya jumlah paroki. *Kedua*, uskup, para imam, dan wakilnya digaji oleh negara dengan sarat semua pelayanan keagamaan gratis. *Ketiga*, para uskup dan imam akan dipilih oleh dewan *kolegialitas* pada tingkat departemen dan distrik, dan pengenaan pakaian kanonik uskup dilakukan oleh metropolitan (uskup agung) tanpa lebih dulu meminta konfirmasi dari paus. Nama uskup hanya perlu diinformasikan kepada paus. Selain itu, ada sekian banyak regulasi yang mereduksi otoritas para uskup, dan menyerahkan kewenangan kepada Dewan Imam, yang harus berpartisipasi dalam pelayanan keuskupan. Kesatuan tradisional antara gereja Prancis dan negara berlangsung pada bulan-bulan pertama.

Ada ikhtiar ilmiah untuk menjawab pertanyaan ini apakah RP itu suatu bidah? Redaktur majalah *La Civiltà Cattolica*, Curci, menegaskan bahwa prinsip umum RP adalah panteistis. (*La Civiltà Cattolica*, I (1850) 1:

115-127). Jika demikian, maka RP tidak dapat digolongkan sebagai suatu bidah, apalagi ateis dan menyangkal Allah.

Sementara itu, tiga prinsip utama RP (kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan) adalah gagasan-gagasan Kristen. Sang Mesias telah mewartakan dan menggenapi gagasan-gagasan tersebut (Luk. 4:18-22, Mat. 23:8; Mrk. 3:35 dan lain-lainnya). Oleh karena itu, kecaman pedas (terutama dari kalangan institusi gerejawi dan kelompok yang dikategorikan "kanan" dan konservatif) terhadap gagasan-gagasan yang melatarbelakangi RP tidak perlu segera diterima sebagai kebenaran. Mungkin malahan terlalu gegabah dan salah sasaran jika orang mengkritik motif sosial, religius, dan politik RP. Hal yang perlu disayangkan ialah tindak fanatisme, kekerasan, tindakan yang disengaja untuk memprovokasi massa atas nama perubahan sosial dan keadilan, yang pada mulanya dimaksudkan untuk menyelamatkan masyarakat manusia, tetapi dalam praktiknya malahan menggilas dan mengorbankan anggota masyarakat.

Sikap yang demikian ini sama sekali tidak berarti bahwa apa yang pada masa lampau buruk dan jahat, saat sekarang ini menjadi baik. Sebab, sejarah mencatat bahwa ada kecaman, bahkan kutukan terhadap RP terutama di masa lalu. Meskipun demikian kita sekarang mengetahui bahwa di dalam sejarah yang diciptakan manusia kita dapat salah tafsir justru karena tidak memanfaatkan sarana atau sumber objektif dan dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan sesaat dan tertentu saja.

Revolusi membawa perubahan kekuasaan masif dari gereja Katolik Roma ke negara. Di bawah *Ancien Régime*, gereja menjadi pemilik lahan yang paling luas dalam negeri Prancis. Perundang-undangan yang diterapkan sejak tahun 1790 menyatakan penghapusan atas otoritas gereja atas pajak berkenaan dengan hasil bumi, menghapus privilese yang dinikmati oleh para *klerus* (kaum berjubah, hierarki), dan mengambil alih hak milik dan harta gereja. Mengingat terjadinya krisis keuangan dan

ekonomi di seantero negeri maka negara mengambil alih hak milik gereja melalui undang-undang tanggal 2 Desember 1789. Untuk mempercepat pemasukan finansial atas *property*, pemerintah memperkenalkan mata uang baru dengan mengembalikan tanah-tanah gereja yang pernah diambil alih pemerintah. Legislasi selanjutnya, pada 13 Februari 1790, menghapus profesi religius kaum biara. Konstitusi Sipil Kaum *Klerus* yang ditetapkan pada 12 Juli 1790 (kendati tidak ditandatangani oleh Raja sampai 26 Desember 1790), mengembalikan para *klerus* pada urusan dan pekerjaan negara dan menuntut bahwa mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Kaum *Klerus* juga dibuat oleh gereja Katolik sebagai lengan sekuler negara. ****

Penutup

Dari dinamika historis paguyuban orang beriman masih belum berkesudahan, dan tidak semua dijelaskan secara detail dan lengkap. Sebagaimana kita pernah melihat (Eddy Kristiyanto 2002, 18-39) adanya ciri karakteristik jemaat Kristiani dalam abad-abad pertama yang dapat ditengarai sebagai antinomi, seperti partikular-universal, ortodoks-heterodoks, komunitas orang berdosa-suci, yuridis-karismatis, inkarnatoris-eskatologis, demikian juga prinsip antinomi itu juga terdapat dalam periode sejarah paguyuban Kristiani kontemporer. Mengkaji secara cermat paguyuban dan patembayan Kristiani yang sebagian besar bercorak eropasentris ini, saya berkesimpulan bahwa *Kekristenan* di sini lebih banyak institusionalistik (kelembagaan). Artinya, pada kurun waktu kontemporer ini (berdasarkan sumber-sumber) *Kekristenan* menuturkan kiprah politik-kekuasaan, bahkan kiprah itu berlebihan sehingga *Kekristenan* menjadi sasaran tembak institusi sekular (baca: negara). Tegasnya, komunitas gerejawi, terutama Katolik Roma, berkali-kali berkumuh dalam tindak politik kekuasaan dan menikmati sehingga pemimpin gereja menjadi bulan-bulanannya di hadapan perubahan masyarakat. Ambil saja beberapa contoh: runtuhnya hegemoni hierarki gereja Katolik berkat Revolusi Prancis dan serangan anti-klerikalisme, dominasi otoritatif atas nama wahyu ilahi di hadapan

kemajuan ilmu pengetahuan (dan teknologi), klaim kebenaran tunggal yang disuarakan melalui kecaman terhadap kesalahan-kesalahan zaman modern (*syllabus errorum*) yang memuncak dalam gerakan modernisme, dan lain sebagainya. Tidak berlebihan kiranya menyatakan bahwa dalam perkembangan selanjutnya sebagian tersebar kecaman dan tuduhan kesalahan “modernitas” kemudian ditinjau ulang, direvisi, dan malah diakui kebenarannya.

Jika paguyuban umat beriman lebih menekankan *nubuat* kenabian, memberikan pelbagai pertimbangan etis-moral, mengilhami dan mendorong muncul serta lahirnya tindakan heroik bagi kemanusiaan yang semakin bermartabat, memperbesar kemungkinan-kemungkinan bagi kepercayaan pada daya-daya insani yang kreatif dengan tetap memberi tempat pada iman-kepercayaan religius supaya kian dipupuk sikap hormat dan rendah hati. Mengingat kita manusia hidup sepanjang zaman dalam keanekaragaman menyangkut kedalaman, keluasan, ketercukupan, dan di atas segala-galanya dalam planet bumi sebagai rumah bersama, maka membangun hidup bersama dalam keragaman dalam praktik berkeadilan, bersubsidiaritas, dan bersolidaritas sosial, serta memperkecil kesenjangan sosial dan keberlanjutan ekologis menjadi *panggilan bersama yang luhur*. Sudah barang tentu semua ini dilakukan bersama-sama dalam kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berkendak baik demi terwujudnya politik *bonum commune*.

Pembacaan saya atas karya John Allen Jr (2009) memberikan alternatif pemikiran yang memantik *diskursus* serius tentang agama (komunitas, paguyuban orang beriman) yang perlu, misalnya perjumpaan dengan Islam, kondisi demografi yang baru (dari dunia Selatan), pelayanan kaum awam yang semakin besar (dan kaum *klerus* melayani bidang lebih spesifik dan (atau) mencari bidang layanan yang baru, pengaruh langsung globalisasi, keseimbangan alam ciptaan (bidang ekologi), bertambahnya kutub-kutub kekinian di mana sesama insan saling bertemu -meminjam

istilah yang kita kenal dalam Kis. 17:22: "areopagus", dan pantekostalisme. Dengan membaca sejarah Kekristenan kontemporer ini kita semakin memahami dinamika, keruwetan, dan langkah maju lembaga (atau institusi) agama, juga faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lembaga tersebut kehilangan visi dan misinya dalam melayani kepentingan dan kebutuhan manusia. Kekristenan (dalam hal ini Kekatolikan Roma) yang terlalu berat sebelah pada masa lalu terutama dengan menguras energi untuk mempertahankan kekuasaan dan marwah otoritas "ilahi" yang digerus oleh ilmu pengetahuan dan arus sekularisasi yang menjurus pada sekularisme. Dalam ceramah di Universitas Gregoriana, Roma (30 April 2015), Charles Taylor yang menulis buku tebal berjudul *A Secular Age*, mengedepankan antara lain bagaimana kehidupan gereja dalam zaman yang sekuler ini dengan bertolak dari pengalaman Eropa, bahkan dunia pertama seperti Amerika Serikat. Apa yang dibedah oleh C. Taylor, yakni ada semacam krisis berkenaan dengan agama macam apa (Allah macam apa) yang tepat di zaman yang kian sekuler seperti sekarang ini? Kemampuan kita untuk menafsirkan jalan bersama merupakan hikmat yang perlu.

Berbicara tentang kemampuan menafsirkan jalan bersama (tanpa memaksakan kehendak sebagai satu-satunya metode) saya sebutkan beberapa contoh karya seperti *Il nome della rosa* (karya Umberto Eco), *Da Vinci Code* (karya Dan Brown), dan karya-karya Yuval Noah Harari (*Sapiens; Homo Deus; dan 21 Lessons for the 21st Century*). Karya-karya ini membicarakan segala sesuatunya mengenai manusia dari perspektif yang beragam: keyakinan, aktivitas, pemikiran, cita-cita (kehendak), kegagalan, usaha, kreativitas, kebrutalan, keutamaan, dan lain sebagainya. Dengan caranya sendiri karya-karya itu menyingkap pencarian dari simpul-simpul kemultidimensian manusia, melukiskan keindahan dan kegunaan segala sesuatu.

Mempelajari dengan saksama *era kontemporer Kekristenan* dengan memperhatikan panggilan paguyuban Kristiani, saya berpandangan bahwa murid-murid Kristus ke depan kian dipanggil untuk bersikap ekumenis dalam masyarakat dunia yang mengglobal. Selalu akan ada kelompok-kelompok yang merasa tidak nyaman bahkan menentang gerakan ekumenis yang menjadi arah paguyuban yang sinodal; Kelompok-kelompok yang tidak pernah memberi tempat bagi dialog dan kesediaan untuk belajar dari para anggota paguyuban lain; Kelompok yang sangat ekstrem, yang tertutup, dan merasa tidak melihat kebenaran ada di luar kelompoknya sendiri. Dalam sejarah, kita mengenal ultramontan, kelompok Mgr. Marcel Lefebvre yang mengembangkan Serikat Pius X (*The Society of St. Pius X*, atau SSPX) dengan perangkatnya seperti *crusader*, yang tetap berada dalam komunitas Katolik. Kekristenan “sedang menghadapi ajalnya” (istilah Jean Delumeau), terutama di daratan Eropa lantaran gempuran materialisme dan sekularisme, di samping agnostisisme.

Namun di belahan lain dari planet ini, ternyata ada kebangkitan kehidupan, seperti paradigma historis yang terjadi di Eropa ketika antiklerikalisme berkembang sebagai satu buah dari ekkses Revolusi Prancis, dan nafsu hierarki gereja yang merambah alam kekuasaan politik, serta konflik yang berakibat pada separasi bermusuhan antara negara vs institusi gereja. Pada saat itu ada *semangat pembaruan dalam bentuk lahirnya ribuan tarekat religius baru yang berminat pada gerakan evangelisasi baru* yang sangat nyata pada karya misi, pelayanan pada kemanusiaan, juga pemahaman baru atas spiritualitas Kekristenan yang hidup dan menggairahkan. Munculnya bentuk-bentuk hermeneuse baru yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II — berkat bimbingan dan pencerahan Roh Yesus Kristus — mendorong munculnya terobosan yang perlu.

Salah satu hasil kerja sama yang menyentosakan hidup bersama sebagai murid-murid Kristus Tuhan adalah dokumen *Joint declaration on the doctrine of justification*. Dokumen ini dihasilkan dan disetujui oleh Federasi Lutheran seluruh dunia dan Dewan Kepausan untuk Memajukan Persatuan Kristiani pada tahun 1999. Kedua belah pihak saling belajar dan mengakui tentang makna serta pemahaman yang umum atas pembenaran oleh kasih karunia Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Kemudian, terpilihnya Mario Bergoglio, SJ (sebagai paus di Roma) yang membuka kiblat terbaru dalam gereja Katolik (dalam kerja sama dengan Kristen Protestan, agama Islam, orang-orang miskin dan terpinggirkan, yakni pribadi-pribadi yang sangat dicintai oleh Yesus Kristus, yang diabadikan dalam Injil, dan Fransiskus Assisi, dan lain sebagainya) menginspirasi dan menyemangati bukan saja institusi agama sendiri tetapi juga yang lain, bahkan mereka yang berseberangan pandangan, terutama untuk kemanusiaan.

Dalam *spirit* pembaruan yang menyegarkan, Paus Fransiskus mengungkapkan inspirasinya secara utuh melalui *Laudato Si* dan *Fratelli Tutti*. Maka dari itu, bagi saya yang tengah menyimak perjalanan sejarah Kekristenan (terutama pada periode kontemporer ini) *spirit* pembaruan itu sedang menunjuk pada arah dan proses remoralisasi agama (yang meliputi institusi, ritus, iman-kepercayaan, teologi, cara hidup) yang bertujuan pada nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, ungkapan orang mursyid dari Lyons, Irenaeus, yang intinya menyibakkan tentang kemuliaan Allah itu nyata ketika segenap manusia dan alam ciptaan-Nya hidup dalam kepenuhan (baca: *Gloria Dei vivens homo*) benar-benar menjadi pertarungan panggilan kemanusiaan kita. Menghidupkan aneka simbol keterarahan pada kepenuhan membuat manusia dan institusi agama seperti paguyuban kristiani menjadi terbuka dan terus-menerus berbenah. Ia tidak sia-sia.****

Daftar Pustaka

- (1). Doc. 59. ASV SS, a. 1874, rubr. 255, fasc. 1. Oggetto: *L'attentato al Principe Bismarck. A Cardinale Antonelli, Pro-Segretario di Stato di SS Roma; da Emidio Taliani, Incaricato d'affari interni. Monaco, li 17 luglio 1874 (2pp.).*
 - (2). Doc. 60. ASV SS, a. 1874, rubr. 255, fasc. 1. Oggetto: *L'attentato al Principe Bismarck. A Cardinale Antonelli, Pro-Segretario di Stato di SS Roma; da Emidio Taliani, Incaricato d'affare interno. Monaco, li 22 luglio 1874 (3 pp.).*
 - (3). Doc. 61. ASV SS, a. 1874, rubr. 255, fasc. 1. Oggetto: *La così detta festa di Sédan. A Cardinale Antonelli, Pro-Segretario di Stato di SS Roma; da Emidio Taliani, Incaricato d'affare interno. Monaco, li 29 agosto 1874 (3 pp.).*
 - (4). Doc. 62. ASV SS, a. 1874, rubr. 255, fasc. 1. Oggetto: *Sulla festa di Sédan. A Cardinale Antonelli, Pro-Segretario di Stato di SS Roma; da Emidio Taliani, Incaricato d'affare interno. Monaco, li 3 settembre 1874 (2 pp.).*
- Acta Sanctae Sedis* 40 (1907): 470-478. (Decr. S. Officii 'Lamentabili', 3 Iul. 1907).
- Acta Sanctae Sedis* 40 (1907): 593-650. (Ep. Encycl. 'Pascendi dominici gregis', 8 Sept 1907).
- Acta Apostolica Sedis* 29 (1937) 5, 145-167. (Enskl. "Mit brennender Sorge").

- Acta Apostolica Sedis*. 54 (1962), No. 14: 786-796. ("Allocutio Ioannis PP. XXIII in sollemni SS. Concilii Inauguratione, die 11 octobris mensis a. 1962").
- Alberigo G. (ed.). *History of Vatican II*. 5 Vols. (English version edited by J.A. Komonchak). Peeters: Maryknoll-Leuven, 1995-2006.
- Allen Jr. J.L. *The Future Church: How Ten Trends Are Revolutionizing the Catholic Church*. Image: New York, 2009.
- Anderson M.S. *War and Society in Europe of the Old Regime 1618-1789*. Fontana Press: London, 1988.
- Aritonang J.S.-A. Eddy Kristiyanto (eds.). *Kamus Gereja & Teologi Kristen*. BPK Gunung Mulia: Jakarta, 2021.
- Armstrong K. *Berperang Demi Tuhan. Fundamentalisme dalam Islam, Kristen, dan Yahudi*. (Penerjemah: Satrio Wahono, Muhammad Helmi, Abdullah Ali; Penyunting: A. Luthfi Assyaukanie). Serambi-Mizan: Jakarta-Bandung, 2000.
- Ashton T.S. *The Industrial Revolution 1760-1830*. Oxford Univ. Press: Oxford-New York 1989.
- Aubert R. 'Pubblicazioni sul modernismo (Collettivo bibliografico)'. In *Concilium* 2 (1966): 128-159.
- Aubert R. Art. 'Modernisme.' In *Sacramentum Mundi. An Encyclopedia of Theology*. IV. (Edited by Karl Rahner cs). Burns & Oates-Herder and Herder: London-New York, 1969, pp. 99-104.
- Aubert R. *La Chiesa nella società liberale*. 5/1. (Traduzione italiana di A.M. Berti-A. Zarri). Marietti Editori: Torino, 1977, pp. 247-250.
- Aubert R. *Il Pontificato di Pio IX (1846-1878)*. XXI/2. S.A.I.E.: Torino, 1976.
- Aubert R.-J. Beckmann - P.J. Corish - R. Lill. "The Church between Revolution and Restoration". Dalam *History of the Church*. (Edited by H. Jedin-J. Dolan). VII. Translated by Peter Becker. Burns & Oates: London, 1981.
- Ball J.-J. McKamey (ed.). *Vatican II Today. Calling Catholics to Holiness and Service*. St. Anthony Messenger Press: Cincinnati, Ohio, 2005.

- Barry C. (ed.). *Readings in Church History. (Vol. One: From Pentecost to the Protestant Revolt. Vol. Two: The Reformation. Vol. Three: The Modern Era)*. Christian Classics, Inc.: Westminster, Maryland, 1985.
- Bellitto C.M. *Renewing Christianity: A History of Church Reform from Day One to Vatican II*. Paulist Press: New York, 2001.
- Bendisoli M. *Germania religiosa nel terzo reich. Conflitti religiosi e culturali nella Germania nazista. Dalla testimonianza (1933-1945) alla storiografia (1946-1976)*. Morcelliana: Brescia, 1977.
- Bentley M. *Politics Without Democracy 1815-1919. Perception and Preoccupation in British Government*. Fontana Paperbacks: London, 1989.
- Berresford-Ellis P. *A History of the Irish Working Class*. Pluto Press: Dublin, 1989.
- Besier G. *Religion. Nation. Kultur. Die Geschichte der christlichen Kirchen in den gesellschaftlichen Umbrüchen des 19. Jahrhunderts*. Neukirchener: Neukirchen – Vluyn, 1992.
- Betti U. *La costituzione dommatica «Pastor Aeternus» del concilio Vaticano I*. Pontificia Atheneo Antonianum: Roma, 1961.
- Biachi G. "L'inutile tentativo di papa Pacelli". *Dalam Historia*, 379 (Sett. 1989): 104-113.
- Birke A.M. *Bischof Kettelers Kritiks am deutschen Liberalismus*. In M. Schmidt-G. Schwaiger (Hrsg.). *Kirchen und Liberalismus im 19. Jahrhundert*. Vanbenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1976.
- Buonaiuti E. *Gioacchino da Fiore. I tempi. La vita. Il messaggio*. Lionello Giordano editore: Cosenza, 1984.
- Blondel M. *Action (1893). Essays on a Critique of Life and a Science of Practice*. (Translated by Oliva Blanchette). University of Notre Dame Press: Notre Dame, Indiana, 1984.
- Blumenthal U.-R. *The Investiture Controversy: Church and Monarchy from the Ninth to the Twelfth Century*. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, PA, 2010, [1982].

- Boff L. *Church: Charism and Power. Liberation Theology and the Institutional Church*. (Translated by H.W. Diercksmeier). Claretian Publications: Quezon City, 1985.
- Bokenkotter T. *Church and Revolution. Catholics in the Struggle for Democracy and Social Justice*. Image Books, Doubleday: New York etc., 1998.
- Brandmüller W. "Der ultramontanen Sippe keck die Stirne bieten." Dalam *Die Tagespost*, Nr. 138. Samstag, 18. November 2000, S. 13-14.
- McBrien R.P. *Catholicism*. Geoffrey Chapman: London, 1994.
- Brinton C. *History of Western Morals*. Paragon House: New York, 1990.
- Brooke R.C. *Popular Religion in the Middle Ages. Western Europe 1000-1300*. Thames and Hudson: Leipzig, 1985.
- Brown A. *The Da Vinci Code. A Novel*. Doubleday: New York, 2003.
- Buonaiuti E. *Il programma dei modernisti*. Società Internazionali Scientifico-Religiosi: Roma, 1908.
- Buonaiuti E. *Gioacchino da Fiore. I tempi-la vita-il messaggio*. Lionello Giordano Editore: Cosenza, 1984.
- Buonaiuti E. *Storia del Cristianesimo*. 3 vol. Dall'Oglio: Roma, 1942.
- Bussi E. "Tra Sacro Romano Impero e Stato assoluto." In *Nuove questioni di storia moderna*. Marzorati: Milano, 1985.
- Carocci G. *Storia del fascismo*. Newton Compton: Roma, 1996.
- Carr W. *A History of Germany 1815-1985*. Edward Arnold: London etc., 1991.
- Carr W. *The Origins of the Wars of German Unification*. Longman: London-New York, 1991.
- Carrier H. *The Social Doctrine of the Church Revisited. A Guide for Study*. Libreria Vaticana: Vatican City, 1990.
- Carroll P.N. cs. *The Free and the Unfree. A New History of the United States*. Penguin Books: New York, 1988.
- Chabod F. *Giovanni Botero*. Studium: Roma, 1984.

- Chadwick O. *The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century*. Cambridge University Press: Cambridge etc., 1990.
- Charle Ch. *Histoire sociale de la France au XIX^e siècle*. Éditions du Seuil: Paris, 1991.
- Charlton W.-T. Mallinson – R. Oakeshott. *The Christian Response to Industrial Capitalism*. Sheed & Ward: London, 1986.
- Chevalier L. *Classes laborieuses et Classes dangereuses à Paris, pendant la première moitié du XIX^e siècle*. Hachette: Paris, 1984.
- Chirico P. *Infallibility. The Crossroads of Doctrine*. (Forward by Bishop B.C. Butler). Michael Glazier: Wilming, Delaware, 1983.
- Cipollono G. *Cristianità–Islam. Cattività e liberazione in nome di Dio. Il tempo di Innocentio III dopo "il 1187"*. Editrice Pontificia Università Gregoriana: Roma, 1992.
- Clapham J.H. *The Economic Development of France and Germany 1815-1914*. Cambridge University Press: Cambridge, 1921.
- Coppa F.J. (ed.). *Controversial Concordats. The Vatican's Relations with Napoleon, Mussolini, and Hitler*. The Catholic University of America Press: Washington D.C., 1999.
- Cornwell J. *Hitler's Pope. Sejarah Konspirasi Paus Pius XII dan Hitler*. (Alih Bahasa: Jimmy Firdaus; Penyunting: Jarwanto S Noegroho). Beranda Publishing: Yogyakarta, 2008.
- Coyne G.V.-M. Heller cs. *The Galileo Affairs: A Meeting of Faith and Science. Proceedings of the Cracow Conference. 24 to 27 May 1984*. Vatican Press: Città del Vaticano, 1985.
- Dal Pane L. 'Il socialismo e le questioni sociali nella prima annata della Civ. Catt.' *Dalam Studi in onore di G. Luzzatto*. III. Milano, 1950.
- Davis D.B. *The Problem of Slavery in Western Culture*. Oxford University Press: New York–Oxford, 1988.
- Deane P. *The First Industrial Revolution*. Cambridge University Press: Cambridge etc., 1990.
- De Felice R. *Le interpretazioni del fascismo*. Laterza: Bari, 1989.

- Delumeau J. *Il Cristianesimo sta per morire*. (Traduzione di O. Guerrieri). Società Editrice Internazionale: Torino, 1978.
- Delumeau J. *Storia vissuta del popolo Cristiano*. (Edizione italiana a cura di Franco Bolgiani; Traduttori di L. Bessone cs). Società Editrice Internazionale: Torino, 1986.
- Dorneich J. *Franz Josef Buß und die katholische Bewegung in Baden*. Herder: Freiburg i.B., 1979.
- Droulers P. "L'épiscopat devant la question ouvrière en France sous la Monarchie de Juillet". In *Revue Historique*, 229 (1963): 335-362.
- Droulers P. *Cattolicesimo sociale nei secoli XIX e XX. Saggi di storia e sociologia*. (Politica e Storia. Raccolti di studi e testi a cura di Gabriele de Rosa, N. 49). Edizioni di Storia e Letteratura: Roma, 1982.
- Droulers P. 'Question sociale, État, Église dans la «Civiltà Cattolica» à ses débuts.' Dalam *Stato e Chiesa nell'Ottocento, Miscellanea in onore di P. Pirri*. Padova, 1962.
- Dwyer J.C. *Church History. Twenty Centuries of Catholic Christianity*. Paulist Press: New York, Mahwah, 1998.
- Eco H. *Il nome della rosa*. Bompiani: Milano, 1988.
- Eddy Kristiyanto A. "The Young Ketteler's Vision on Social Problems." Pontificia Universitas Gregoriana (Facultas Historiae Ecclesiasticae (*Dissertatio ad Licentiam*)): Romae, 1991.
- Eddy Kristiyanto A. "The Workers' Bishop: Wilhelm Emmanuel von Ketteler (1811-1877). A Study of Ketteler's Vision and Practice in Responding to the Labour Question in the Light of Christianity." Pontificia Universitas Gregoriana, Facultad Historiae Ecclesiasticae, Romae, 1996. (*Disertasi*).
- Eddy Kristiyanto A. "Pergumulan Gereja sekitar Masalah Buruh. Belajar dari Sejarah". Dalam *Gereja Indonesia, Quo Vadis? Hidup Menggereja Kontekstual*. (Editor: J.B. Banawiratma). Kanisius: Yogyakarta, 2000, hlm. 165-180.
- Eddy Kristiyanto A. *Gagasan yang Menjadi Peristiwa. Sketsa Sejarah Gereja Abad I-XV*. Kanisius: Yogyakarta, 2003 (Cetakan ke-5).

- Eddy Kristiyanto A. *Diskursus Sosial Gereja Sejak Leo XIII*. DIOMA: Malang, 2003.
- Eddy Kristiyanto A. *Reformasi dari Dalam. Sejarah Gereja Zaman Modern*. Kanisius: Yogyakarta, 2004 (Cetakan ke-5).
- Eddy Kristiyanto A. "Pelajaran dari Barat: Kajian atas Relasi Gereja dan Negara dari Perspektif Historis". Dalam *Etos & Moralitas Politik. Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum*. Kanisius: Yogyakarta, 2004, hlm. 74-136.
- Eddy Kristiyanto A. "Sejarah dan Kritik terhadap Krisis Modernisme: Pra dan Pasca *Sodalitium Pianum*." Dalam *Diskursus*. Vol. 4, No. 3, Oktober 2005 (a): 251-277.
- Eddy Kristiyanto A. "Absolutisme Negara dan Lembaga Agama: Pasca *Aufklärung* di Eropa Barat", *Melintas. A Journal of Philosophy and Religion*. Vol. 21, No. 2, August–November 2005 (b): 211-230.
- Eddy Kristiyanto A. (ed.). *Konsili Vatikan II: Agenda yang Belum Selesai*. (Seri Teologi Driyarkara 01). OBOR: Jakarta, 2006.
- Eddy Kristiyanto A. (ed.). *Spiritualitas dan Masalah Sosial*. OBOR: Jakarta, 2005.
- Eddy Kristiyanto–Franz Magnis-Suseno. "Fratricelli. Perspektif-perspektif Historis tentang Radikalisme Religijs dalam Agama Katolik Roma". Dalam *Radikalisme Agama* (Editor Bahtiar Effendy, Hendro Prasetyo). PPIM–IAIN: Jakarta, 1998, hlm. 45-82.
- Edwards D.L. *Christianity. The First Two Thousand Years*. Cassell: London, 1997.
- Ellingsen M. *The Evangelical Movement*. Augsburg Publishing Company: Minneapolis, MN, 1988.
- Engels F. *The Condition of the Working Class in England. From Personal Observation and Authentic Sources*. (Introd. by Eric Hobsbawm). Grafton Books: London etc., 1986.
- Evans E.L. *The German Center Party 1870 - 1933. A Study in Political Catholicism*. Southern Illinois Univ. Press: Carbondale-Edwardsville, 1981.

- Evans G.R. *Bernard of Clairvaux*. Oxford University Press: New York–Oxford, 2000.
- Eyck E. *Bismarck and the German Empire*. George Ellen & Unwin: London etc. ¹⁰1980, 3rd edition.
- Faggioli M. "Vatican II: The History and the Narratives." *Dalam Theological Studies*, 73 (2012) 4: 249-767.
- Fastenrath E. *Papsttum und Unfehlbarkeit*. Verlag Josef Knecht: Frankfurt a.M., 1991.
- Figgis J.N. *Theory of the Divine Right of Kings*. Cambridge University Press: Cambridge, ²1994.
- Fogazarro A. *Il santo*. Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.: Milano (1905; 1931), 1985.
- Forni G. *L'essenza del Cristianesimo". Il problema ermeneutico nella discussione protestante e modernista (1897-1940)*. Il Mulino: Bologna, 1992.
- Franz A. *Der soziale Katholizismus in Deutschland bis zum Tode Kettelers*. M.-Gladbach, 1914.
- Franzen A. *A Concise History of the Church*. (Revised and Edited John P. Dolan. Translated by Peter Becker). Burns & Oates–Herder and Herder: New York–London, 1969.
- Fulbrook M. *A Concise History of Germany*. Cambridge University Press: Cambridge etc., ²1991.
- Furet F. *Il secolo della Rivoluzione 1770-1880*. (Traduzione di Bettino Betti). Rizzoli: Milano, 1989.
- Gaillard J.-M.–A. Lespagnol. *Les mutations économiques et sociales au XIX^e siècle (1780-1880)*. E.F. Nathan: Potiers, 1991.
- Gaillardetz R.R.–C.E. Clifford. *Keys to the Council. Unlocking the Teaching of Vatican II*. Liturgical Press: Collegeville, Minnesota, 2012.
- Gambasin A. *Il movimento sociale nell'opera dei congressi (1874-1904). Contributo per la storia del cattolicesimo sociale in Italia*. Apud Aedes Universitatis Gregorianae: Romae, 1958.

- Garrison J. *L'Édit de Nantes et sa révocation. Historire d'une intolérance*. Éditions du Seuil: Paris, 1985.
- Godechot J. *Le rivoluzioni (1770-1799)*. (Tradizione dal francese e aggiornamento bibliografico di cura di Bianca Valota Cavallotti). Mursia: Milano, 1989.
- Godechot J. *La controrivoluzione. Dottrina e azione (1789-1804)*. (Tradizione dal francese e aggiornamento bibliografico di cura di Enzo Turbiani). Murzia: Milano, 1988.
- González J.L. *The Story of Christianity. Volume 2: The Reformation to the Present Day*. HarperSan Francisco: New York, 1985.
- Goubert P. *L'ancien régime*. 2 vol. (Traduzione: Alberto Arichini; Revisione: Sandro Chierici). Jaca Book: Milano, 1974.
- Grasso D. "La conversione e l'apostasia di G. Tyrrell". In *Gregorianum* 38 (1957): 446-480.
- Grenville J.A.S. *Europe Reshaped 1848-1878*. Fontana Press: London, 1988.
- Grogan G.F. *The Noblest Agitator. Daniel O'Connell and the German Catholic Movement 1830-50*. Veritas: Dublin, 1991.
- Grundmann H. *Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1977.
- Guasco M. *Modernismo. I fatti, le idee, i personaggi*. San Paolo: Cinisello Balsamo, 1995.
- Hadden J.K. "Religious Fundamentalism". Dalam *Encyclopedia of Sociology*. (E.F. Borgatta, cs. eds.). III. Macmillan Publ. Co.: New York etc., 1992, 1637-1642.
- Harari Y.N. *Sapiens. A Brief History of Humankind*. Vintage: London, 2011.
- Harari Y.N. *Homo Deus. A Brief History of Tomorrow*. Vintage: London, 2017.
- Harari Y.N. *21 Lessons for the 21st Century*. Jonathan Cape: London, 2018.

- Harrison J.F.C. *Early Victorian Britain 1832-51*. Fontana Press: London, 1989.
- Harrison J.F.C. *Late Victorian Britain 1875-1901*. Fontana Press: London, 1990.
- Hasting A. *A Concise Guide to the Documents of the Second Vatican Council*. 2 Vols., Darton, Longman & Todd: London, 1968.
- Heaney J.J. Art. "Modernism". In *New Catholic Encyclopedia*. 2nd edition. IX. Catholic University of America: Washington D.C., 2002, pp. 752-757.
- Heid S. *Chilliasmus und Antichrist-Mythos. Eine frühchristliche Kontroverse um das Heilige Land*. Borengässer: Bonn, 1993.
- Hennesey J. *American Catholics. A History of the Roman Catholic Community in the United States*. Oxford University Press: Oxford etc., 1983.
- Hofmann W. (unter Mitwirkung von W. Abendroth und I. Fetscher). *Ideengeschichte der sozialen Bewegung des 19. und 20. Jahrhunderts*. Walter de Gruyter: Berlin-New York, 71979.
- Houtin A. *Histoire du Modernisme catholique*. Chez l'Auteur: Paris, 1913.
- Hufton O.H. *Europe: Privilege and Protest 1730-1789*. Fontana Press: London, 41990.
- Hürten H. *Geschichte des deutschen Katholizismus 1800-1960*. Matthias-Grünwald: Mainz, 1986.
- Jarlot G. *Pio XI. Doctrine et action sociale (1922-1939)*. Presses de l'Université Grégorienne: Roma, 1973.
- Jedin H. *Geschichte des Konzils von Trient*. 4. Bd. Herder Verlag: Freiburg im Breisgau, 1951-1976.
- Jedin H. *Breve storia dei concili. I ventuno concili ecumenici nel quadro della storia della Chiesa*. (Traduzione di N. Beduschi). Morcelliana: Roma-Brescia, 71986.
- Jedin H. *Chiesa della fede. Chiesa della storia. Saggi scelti*. (Con un saggio introduttivo di Giuseppe Alberigo). (Trad. di A. Destro-A.M. Fidora-G. Poletti). Morcelliana: Brescia, 1972.

- Jedin H. cs. (ed.). *History of the Church*. IX-X. Burns & Oates: London, 1981.
- Jenkins P. *The New Anti-Catholicism: The Last Acceptable Prejudice*. Oxford University Press: Oxford etc., 2003.
- Jenkins P. *The Next Christendom: The Coming of Global Christianity*. Oxford University Press: Oxford etc., 2011.
- Jodock D. (ed.). *Catholicism contending with modernity: Roman Catholic Modernism and Anti-modernism in Historical Context*. Cambridge University Press: Cambridge etc., 2000.
- Johnson J.T. *Ide Perang Suci dalam Tradisi Islam dan Barat*. (Penerjemah: Ali Noor Zaman, Penyunting: Dede Nurdin). Qalam: Yogyakarta, 2002.
- Kann R.A. *A History of the Habsburg Empire 1526-1918*. University of California Press: Berkeley/Los Angeles/London, 1980.
- Kemp T. *Industrialization in Nineteenth-Century Europe*. Longman: London-New York, 1989.
- Ketteler W.E. von. *Sämtliche Werke und Briefe*. (Bearbeitet von Erwin Iserloh, Christoph Stoll, Emil Valasek, Norbert Jäger). I,1-5. v. Hase & Koehler Verlag: Mainz, 1977-1985.
- Kirchberger G.-J.M. Prior (ed.). *Konsili Yohanes XXIII Berpancawindu 1962-2002*. Ledalero: Maumere, 2003.
- Krier Mich M.L. *Catholic Social Teaching and Movements*. Twenty-Third Publications: Mystic, CT, 1998.
- Labbé Y. 'Catégories de la modernité'. In *Nouvelle revue théologique* 114 (1982): 358-380.
- Labrousse, E. *La révocation de l'Edit de Nantes. Une foi, une loi, un roi?* Éditions Payot, Saint-Amand, 1990.
- Lamb M.L.-M. Levering (ed.). *Vatican II: Renewal within Tradition*. Oxford University Press: Oxford etc., 2008.
- Langner A. (Hrsg.). *Säkularisation und Säkularisierung im 19. Jahrhundert*. Schöningh: München, 1978.
- Lassalle F. *Ausgewählte Reden und Schriften*. (Hrsg. von H.J. Friederici). Dietz: Berlin, 1991.

- Lewy G. *Religion and Revolution*. Oxford University Press: New York, 1974.
- Lindemann A.S. *A History of European Socialism*. Yale University Press: New Haven and London, 1983.
- Loisy A. *Il vangelo e la Chiesa e Intorno a un piccolo libro*. (Con un saggio introduttivo di L. Bedischi. Traduzione italiana di Ubaldini). Ecole Française de Rome: Roma, 1975.
- Lortz J. *Geschichte der Kirche in ideengeschichtlicher Betrachtung*. 2. Bd. Verlag Aschendorff: Münster, ²¹1962-1964.
- MacCullach D. *A History of Christianity. The First Three Thousand Years*. Penguin Books: London etc., 2010.
- Machamer P. (ed.). *The Cambridge Companion to Galileo*. Cambridge University Press: Cambridge etc., 1999 (Reprinted).
- Maier C.T. *Preaching the Crusades. Mendicant Friars and the Cross in the Thirteenth Century*. Cambridge University Press: Cambridge, 1998.
- Maisonneuve H. *L'Inquisition*. Desclée-Novalis: Lille-Ottawa, 1989.
- Marsden G.M. *Fundamentalism and American Culture*. Oxford University Press: New York, 1980.
- Marsden G.M. *Understanding Fundamentalism and Evangelicalism*. Wm. Eerdmans: Grand Rapids, Michigan, 1990.
- Marsden G.M. "Evangelical and Fundamental Christianity." Dalam M. Eliade (ed.). *The Encyclopedia of Religion*. V. Macmillan-Collier: New York-London, 1987, 190-197.
- Martina G. *La chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo, II: l'età dell'assolutismo; La Chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo, IV: L'età del totalitarismo*. Morcelliana: Brescia, ^o1986-^o1987.
- Martina G. *Pio IX (1846-1850)*. Università Gregoriana Editrice: Roma, 1974.
- Martina G. *Pio IX (1851-1866)*. Editrice pontificia università gregoriana: Roma, 1986.

- Martina G. *Pio X (1867-1878)*. Editrice pontificia università gregoriana: Roma, 1990.
- Martina G. *Storia della storiografia ecclesiastica nell'otto e novecento*. I, PUG; Roma, 1993.
- Marty M.E.-R. Scott Appleby. *The Glory and the Power: Fundamentalist Challenge to the Modern World*. Beacon Press: Boston, 1992.
- Marx K.-F. Engels. *Manifesto of the Communist Party*. (Authorized English Translation. Edited and Annotated by F. Engels, 1888). William Reeves, 185: London, 1888.
- Mathiez A.-G. Lefebvre. *La rivoluzione francese*. Vol. 1. (Trad. di M. Bonfantini-S. Cotta). Piccola Biblioteca Einaudi: Torino, 1988.
- Mayer H.E. *The Crusades*. Oxford University Press: Oxford, 1985.
- McBrien R. *Catholicism*. Geoffrey Chapman: London, 1994.
- McCarthy E.W.J. (ed.). *Trade Unions. Selected Reading*. Penguin: New York etc., 1987.
- McManners J. (ed.). *The Oxford History of Christianity*. Oxford University Press: Oxford-New York, 1990.
- Menozi D. *La chiesa Cattolica e la secolarizzazione*. Piccola Biblioteca Einaudi: Torino, 1993.
- Messner J. *Die soziale Frage im Blickfeld der Irrwege von gestern, der Sozialkämpfe von heute, der Weltentscheidungen von morgen*. Tyrolia: Innsbruck-Wien-München, 1964.
- Mezzadri L. *La Chiesa e la rivoluzione francese*. Paoline: Cinisello Balsamo (Milano), 1989.
- Misner P. *Social Catholicism in Europe. From the Onset of Industrialization to the First World War*. Crossroad: London, 1991.
- Mockenhaupt H. *Das Erbe der Arbeiterbischofs Wilhelm Emmanuel von Ketteler*. Lautesdorf a.R., 1977.
- Molony J. *The Worker Question. A new historical perspective on Rerum Novarum. Includes a translation of the Encyclical*. Gill and Macmillan: Dublin, 1991.

- Mori R. *Il tramonto del potere temporale 1866-1870*. Edizioni di storia e letteratura: Roma, 1967.
- Morsey R. *Der Untergang des politischen Katholizismus. Die Zentrumsparlei zwischen christlichem Selbstverständnis und "Nationaler Erhebung" 1932/33*. Belser Verlag: Stuttgart-Zürich, 1977.
- Murri R. *La filosofia nuova e l'enciclica contro il modernismo*. Società Nazionale di Cultura: Roma, 1907.
- Nèdoncella M. *La pensée religieuse de Friedrich von Hügel*. Vrim: Paris, 1935.
- Neuner J.-J. Dupuis (ed.). *The Christian Faith in the Doctrinal Documents of the Catholic Church*. The Mercier Press: Dublin and Cork, 1973.
- Nipperdey T. *Deutsche Geschichte 1800-1866*. (I). *Bürgerwelt und starker Staat*. 1866-1918: *Arbeitswelt und Bürgergeist* (Bd. I); 1866-1918: *Machtstaat vor der Demokratie* (Bd. II). C.H. Beck: München ¹1987-²1991.
- NN. *Dokumen Konsili Vatikan II*. (Terjemahan R. Hardawiryana). OBOR: Jakarta, 1993 (⁴1998).
- NN. *Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum 77 Constitutiones Decreta Declarationes. Cura et Studio Secretariae Generalis Concilii Oecumenici Vatican II*. Vaticanis, MCMLXVI.
- NN. *Antifascismo resistenza e clero bresciano*. Centro di documentazione Brescia (Ce.Doc). La Nuova Cartografica: Brescia, 1985.
- Noether E.P. "Vatican Council I: Its Political and Religious Setting." Dalam *The Journal of Modern History*. Vol. 40, No. 2 (Jun. 1968): 218-233.
- Noll M.A. *American Evangelical Christianity: An Introduction*. Wiley-Blackwell: Hoboken, NJ., 2000.
- Norwich J.J. *Absolute Monarchs. A History of the Papacy*. Random House: New York, 2011,
- O'Collins G. "Does Vaican II Represent Continuity or Discontinuity." Dalam *Theological Studies*. 73 (2012) 4: 768-794.
- O'Leary D. *Roman Catholicism and Modern Science. A History*. Continuum: New York-London, 2007.

- Olivier P. "Les modernisme et les moderniste." In *Recherches de science religieuse*. 74 (1986): 399-440.
- Ollenburger B.C. "Gerhard von Rad's Theory of Holy War". In G. von Rad. *Holy War in Ancient Israel*. (Translated and edited by Marva J Dawn). William B. Eerdmans: Grand Rapids, Michigan, 1990 1-33.
- Olson R.E. *Reformed and Always Reforming: The Postconservative Approach to Evangelical Theology*. Baker: Grand Rapids, Michigan, 2007.
- O'Malley J.W. *What Happened at Vatican II*. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts-London, 2008.
- O'Malley J.W. *Vatican I: The Council and the Making of the Ultramontane Church*. The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts-London, 2018.
- O'Meara T. F. *Fundamentalism: A Catholic Perspective*. Paulist Press: New York, 1990.
- Oriani A. *La lotta politica in Italia*. (A cura di P. Pericoli). Cappelli: Roma, 1969.
- Pacelli F. *Diario della conciliazione con verbali e appendice di documenti*. (A cura di M. Maccarrone). Libreria Editrice Vaticana: Città del Vaticano, 1959.
- Parker G. *Europe in Crisis 1598-1648*. Fontana Press: London, 1990.
- Pasztor E. "Ideale del monachesimo ed età dello Spirito come realtà spirituale e forma d'utopia". Dalam *L'età dello Spirito e la fine dei tempi in Gioacchino da Fiore e nel gioachimismo medievale*. (Atti del II congresso internazionale di studi gioachimiti, 6-9 settembre 1984). Centro internazionale di studi gioachimiti: S. Giovanni in Fiore, 1986.
- Patre M. *Autobiography and Life of George Tyrrell*. Edward Arnold: London, 1912.
- Pflanze O. *Bismarck and the Development of Germany*. I: *The Period of Unification, 1815-1871*. II: *The Period of Consolidation, 1871-1880*. III: *The Period of Fortification, 1880-1898*. Princeton University Press: Princeton, 2nd ed. 1971.

- Pfũlf O. *Bischof von Ketteler (1811-1877). Eine geschichtliche Darstellung*. 3 Bd., Hansebook: Mainz, 2017 (Reprinted).
- Pierrard P. 1848 *Les pauvres, l'évangile et la revolution*. Desclée: Paris, 1977.
- Pierrard P. *L'Église et les Ouvriers en France (1840-1940)*. Hachette: Poitiers 1984.
- Poulat É. *Storia, dogma e critica nella crisi modernistica*. (Con la prefazione di Guido Verucci). Morcelliana: Brescia, 1967.
- Poulat É. *Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau secret international antimoderniste: la 'sapinière' (1909-1921)*. Casterman: Paris, Tournai, 1969.
- Poulat É. *Modernistica. Horizons, Physionomies, Débats*. Nouvelles Editions Latines: Paris, 1982.
- Price R. *A Social History of Nineteenth-Century France*. Hutchinson: London etc., 1988.
- Price R. *The Revolutions of 1848*. Macmillan: London, 1989.
- Prodi P. *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*. Il Mulino: Bologna, 1982.
- Rad G. von. *Holy War in Ancient Israel*. (Translated and edited by Marva J. Dawn). William B. Eerdmans: Grand Rapids, Michigan, 1990.
- Rapport M. 1948. *Year of Revolution*. Basic Books: New York, 2008.
- Rauschenbusch W. *Christianity and the Social Crisis in the 21st Century. The Classic That Woke Up the Church*. (Forward by Paul B. Raushenbush). HarperCollins e-books: New York, 2007.
- Reardon B.M.G. Art. 'Christian Modernism'. In *The Encyclopedia of Religion*. (Editor in Chief Mircea Eliade). X. Macmillan Publishing Company–Collier Macmillan Publishers: New York–London, 1987, pp. 7-14.
- Regout R.H.W. *La doctrine de la guerre juste de St. Augustin à nos jours*. Cerf: Paris, 1975.

- Reinartz H. von Ketteler und Leo XIII. *Der soziale Bischof und der soziale Papst des 19. Jahrhunderts*. Düsseldorf, 1927.
- Riccardi A. *Roma "città sacra"? Dalla Conciliazione all'operazione Sturzo*. Vita e Pensiero: Milano, 1979.
- Rivière J. *Le modernisme dans l'Église. Etude d'histoire religieuse contemporaine*. Letouzey et Anè: Paris, (1929), 1989.
- Robertson P. *Revolutions of 1848. A Social History*. Princeton University Press: Princeton, New Jersey, 1980.
- Robinson I.S. *The Papacy 1073-1198. Continuity and Innovation*. Cambridge University Press: Cambridge etc., 1990.
- Roos L. *Kirche, Politik, soziale Frage – Das verpflichtende Erbe Bischof Kettelers*. (Kirche und Gesellschaft no. 41). J.P. Bachem: Köln, 1977.
- Rosmini A. *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa. Trattato dedicato al Clero Cattolico (Con aggiunte e chiarificazioni inedite)*. (A cura di C. Riva). Morcelliana: Brescia, 1985.
- Rostow W.W. *The Stages of Economic Growth*. Cambridge University Press: London, 1969.
- Ruiz F. "Giovanni della Croce". *Dalam Dizionario Enciclopedico di Spiritualità*. II. Città Nuova: Roma, 1995.
- Rush O. *Still Interpreting Vatican II: Some Hermeneutical Principles*. Paulist: New York, 2004.
- Sabatier P. *Les modernistes*. Fischbacher: Paris, 1909.
- Sagarra E. *An Introduction to Nineteenth Century Germany*. Longman: Essex, 1980.
- Sandfuchs W. *Pater Rupert Mayer. Verteidiger der Wahrheit, Apostel der Nächstenliebe, Wegbereiter moderner Seelsorge*. Echter Verlag: Würzburg, 1981.
- Sarda y Salvany F. *Liberalism Is a Sin*. (Translated by Conde B. Pallen). Tan Books and Publishers, Inc.: Rockford, Illinois, 1993.
- Schäfers M. "Rerum Novarum—The Result of Christian Social Movement 'from Below'". *Dalam Concilium* 1991/5.

- Scammell G.V. *The First Imperial Age. European Overseas Expansion C. 1400-1715*. Unwin Hyman: London-Boston-Sydney, 1989.
- Schatz K. *Zwischen Säkularisation und zweitem Vatikanum. Der Weg des deutschen Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert*. Josef Knecht: Frankfurt am Main, 1986.
- Schimmelpfennig B. *The Papacy*. (Translated by James Sievert). Columbia University Press: New York, 1992.
- Schmidt M.-G. Schwaiger (Hrg.). *Kirche und Liberalismus im 19. Jahrhundert*. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 1976.
- Schmitz R.M. *Dogma und Praxis. Der Dogmenbegriff der Modernisten Edward Le Roy kritisch Dargestellt*. Libreria Editrice Vaticana: Città del Vaticano, 1993.
- Schultenover D.G. *A View from Rome. On the Eve of the Modernist Crisis*. Fordham University Press: New York, 1993.
- Sheehan J.J. *Der deutsche Liberalismus. Von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg 1770-1914*. Verlag C.H. Beck: München, 1983.
- Shirer A.L. *The Rise and Fall of the Third Reich. A History of Nazi Germany*. Mandarin: London, 1991.
- Siley-Smith J. *What Were the Crusades?* The Macmillan Press Ltd.: London-Basingstoke, 1977.
- Soboul A. *La Rivoluzione francese*. (Traduzione di Giuseppe Vettori). Grandi Tascabili Economici Newton: Roma, 1974.
- Soong-Chan Rah. *The Next Evangelicalism: Freeing the Church from Western Cultural Captivity*. InterVarsity Press: Downers Grove, IL., 2009.
- Sorge B. 'È superato il concetto tradizionale di dottrina sociale della Chiesa?' *Dalam Civiltà Cattolica*. 1968, I, 423-436.
- Sorge B. "Da De Gaspari a Sturzo, per un nuovo partito." *Dalam Quaderni di Azione Sociale*. No. 88 - 89 (Luglio-Ottobre 1992): 3-8.
- Steinmetz D.C. *Taking the Long View. Christian Theology in Historical Perspective*. Oxford University Press: Oxford etc., 2011.

- Stern F. *Gold and Iron. Bismarck, Bleichröder, and the Building of the German Empire*. Penguin Books: Harmondsworth, Middlesex, etc., 1987.
- Stone N. *Europe Transformed 1878-1919*. Fontana Press: London, ⁵1990.
- Sullivan M. *101 Questions and Answers On Vatican II*. Paulist Press: New York, 2002.
- Sutherland D.M.G. *France 1789-1815. Revolution and Counterrevolution*. Fontana Press: London, 1990.
- Taylor A.J.P. *The Origins of the Second World War*. Penguin Books: Middlesex etc., 1979.
- Taylor A.J.P. *The Struggle for Mastery in Europe 1848-1918*. Oxford University Press: Oxford – New York, ⁶1986.
- Taylor A.J.P. *The Course of German History. A Survey of the Development of German History since 1815*. Routledge: London, ¹¹1988.
- Taylor C. *A Secular Age*. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts–London, 2007.
- Tocqueville A. de. *Alexis de Tocqueville tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat*. (Penerjemah: Yusi A. Pareanom; Penyunting: Hawe Setiawan). Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, 2005.
- Tönnies F. *Community and Society (Gemeinschaft and Gesellschaft)*. With a new introduction by John Samples. Translated by Charles P. Loomis. Taylor & Francis, 2017. E-Book.
- Tuathaigh G.Ó. *Ireland Before the Famine 1798-1848*. Gill and MacMilland: Dublin, 1987.
- Vannoni G. *Massoneria, fascismo e chiesa cattolica*. Laterza & Figli Spa: Roma-Bari, 1979.
- Vigener F. *Ketteler. Ein deutsches Bischofsleben des 19. Jahrhunderts*. Oldenburg: Berlin-München, 1924.
- Villain J. *L'enseignement social de l'Église*. Cerf: Paris, 1953. I. 20-63.
- Virgoulay R. *Blondel et la Modernisme: La philosophie de l'action e les sciences religieuses (1896-1913)*. Cerf: Paris, 1980.

- Virgoulay R. *"L'Action" de Maurice Blondel. 1893. Relecture pour u centenaire.* Beauchesne: Paris, 1992.
- Visistin S. *Rivelazione divina ed esperienza umana. La proposta di George Tyrrell e la risposta di Karl Rahner.* Peter Lang: Bern, 1999.
- Vorgrimler H. (Gen. ed.). *Commentary on the Documents of Vatican II.* (Translated by L. Adolphus, K. Smyth, R. Strachan.) 5 Vols. Burns & Oates-Herder & Herder: London - New York, 1967-1969.
- Wache B. *Monseigneur Louis Duchesne (1843-1922).* Ecole Française de Rome: Roma, 1922.
- Weger K.-H. *Karl Rahner: An Introduction to His Theology.* (Translated by D. Smith). Burns & Oates: London, 1980.
- Weigel G. cs. (eds.). *Building the Free Society. Democracy, Capitalism, and Catholic Social Teaching.* William B. Eerdmans: Grand Rapids-Michigan, 1993.
- Wilde M.J. *Vatican II: A Sociological Analysis of Religious Change.* Princeton University Press: Princeton, 2007.
- Wilson B. *Religion in Sociological Perspective.* Oxford University Press: Oxford-New York, 1992.
- Wiskemann E. *Europe of the Dictators 1919-1945.* Fontana Press: London, 1985.
- Woodbridge J.D.-F.A. James II. *Church History. Vol. II. From Pre-Reformation to the Present Day. The Rise and Growth of the Church in Its Cultural, Intellectual, and Political Context.* Zondervan: Grand Rapids-Michigan, 2013.
- Woods Jr. T.E. *The Church Confronts Modernity. Catholic Intellectuals & the Progressive Era.* Columbia University Press: New York, 2004.
- Zizola G. "He Answered Papal Summons to Journalism". *Dalam National Catholic Reporter.* October 4, 2002.

Gambar dan Keterangan Sumber

(Keterangan: 15, 31, 34, 37, dst. di bawah ini menunjuk nomor halaman)

15	Lorenzo Valla (kiri)	https://www.abebooks.it/9781975977450/Donation-Constantine-Valla-Lorenzo-1975977459/plp
15	<i>Donatio Constantini</i> (kanan)	http://britannica.com/topic/donation-of-constantine
31	Paulus Joseph Ritter von Riegger	https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Paul_Joseph_Riegger_(1705-1775).jpg
34	Cardinal Richelieu (Armand Jean du Plessis)	https://www.flickr.com/photos/sheepdog_rex/17802860214
37	Theresia Avila (paling kiri)	https://www.pinterest.com/pin/558727897517311338/
37	Bernadette Soubirous	http://en.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous
37	Gian Lorenzo Bernini	https://www.wikiart.org/en/gian-lorenzo-bernini/self-portrait-as-a-young-man-1623-1
37	Francesco Borromini	https://www.famousbirthdays.com/people/francesco-borromini.html
38	St. Gertrudis (kiri)	https://www.pinterest.es/pin/478929741615661884/
38	St. Paulus Salib (kanan)	https://www.pinterest.com/pin/375346950190530039/

45	Poster/Sketsa Propaganda RP	Is this what you pay taxes for? Join the Revolution
46	Karikatur tentang sebab-sebab Revolusi Prancis (dari kiri)	http://kiidfrenchrevolution.weebly.com/causes-of-the-french-revolution.html
46	<i>Das ist mein liebe Sohn an dem ich Wohlgefallen habe</i>	https://www.tumblr.com/tagged/it-KILLS-ME-EVERYTIME
46	<i>The Patriotic De-Fattening Machine</i>	http://plinthos.blogspot.com/2017/07/anti-clericalism-one-acceptable.html ; http://www.nybooks.com/daily/2015/01/09/charlie-hebdo-laughter-terror/
46	Guillotine dan eksekusi	https://sites.google.com/a/greenvilleschools.us/shenderson/french-revolution
47	Joseph de Maistre	https://www.britannica.com/biography/Joseph-de-Maistre
48	Marie Antoinette	https://www.ranker.com/list/first-hand-descriptions-of-marie-antoinette/gordon-cameron
50	Anne Louise Germaine de Staël-Holstein	http://www.europeana.eu/en/exhibitions/pioneers/madame-de-stael
52	Alexis de Tocqueville	http://www.biography.com/people/alexis-de-tocqueville-39150
54	Pius VI	https://fineartamerica.com/featured/2-pope-pius-vi-giovanni-angelo-braschi-mary-evans-picture-library.html
54	Pius VII	http://etc.usf.edu/clipart/21300/21332/pius_vii_21332.htm
55	Napoleon Bonaparte	http://fr.hellokids.com/c_14678/coloriage/coloriages-histoire-et-pays/coloriages-france/coloriage-personnages-historiques-francais/coloriage-de-napoleon-bonaparte
55	Napoleon Bonaparte	https://wallpaperaccess.com/napoleon

71	Liberalism is a sin	https://www.goodreads.com/book/show/3769461-liberalism-is-a-sin
71	Felix Sarda y Salvany	http://www.wikiwand.com/en/F%C3%A9lix_Sard%C3%A0_y_Salvany
74	Giuseppe Mazzini	http://www.thefamouspeople.com/profiles/giuseppe-mazzini-1528.php
74	Karikatur karya R. Brom	www.marianland.com/atheology03.html . "I don't need you amateur any more. Now I have my comrades, The Communists, Marxists, Socialists, Liberals and Terrorists. They are true professionals." <i>Rafael Brom: True Professionals (Ink) 1982</i>
75	Hugues Felicité Robert de Lamennais	https://www.filosofico.net/lamennais.htm
80	Antonio Rosmini	http://rosminipublications.com/product/witness-number-22/
80	Sampul buku tentang Lima Luka Gereja Kudus	https://cavanbenji.blogspot.com/2016/11/delle-cinque-piaghe-della-santa-chiesa.html
82	JB. Henri-Dominique Lacordaire	https://www.magnoliabox.com/products/henri-dominique-lacordaire-xir1272863
82	Charles de Montalembert	https://www.geni.com/people/Charles-Forbes-Ren%C3%A9-comte-de-Montalembert/6000000009536785506
88	Emile Zola	http://www.oakauctions.com/lot-3629.aspx
88	Un diner en familie	https://www.art.com/products/p12066098-sa-i1501921/emmanuel-poire-caran-d-ache-caricature-of-a-family-dinner-before-and-after-having-talked-about-the-dreyfus-affair-circa-1894.htm
91	Louis Veuillot	https://www.britannica.com/biography/Louis-Veuillot
91	Les Hommes d'Église	http://collections.vam.ac.uk/item/O185736/louis-veuillot-print-betbeder-faustin/

95	Félix Dupanloup	https://www.astro.com/astro-databank/Dupanloup,_F%C3%A9lix
95	Paus Pius IX	https://umblepie-northernterritory.blogspot.com/2014/03/pope-pius-ix-and-italian-risorgimento.html
99	Johann Adam Möhler	http://www.britannica.com/biography/Johann-Adam-Mohler
101	Giuseppe Garibaldi	http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Giuseppe_Garibaldi
103	Paus Pius IX: This 1870 German drawing shows Pius IX as Papst und König (Pope and King)	http://1902encyclopedia.com/today-in-history/today-29apr11.html
103	<i>Il papa Pio Nono</i>	https://www.pinterest.ca/pin/657595983084595577/
110	<i>Henricus the Emperor, with his wife and child, barefoot and barelegd, waiting on the pope Hildebrand, three daies and three nights, at the gates of Canusium, before he could be suffered to come in.</i>	https://www.itakehistory.com/post/walk-to-canossa
110	Otto von Bismarck	https://historyofhumanity.tumblr.com/post/132756962642/otto-von-bismarck-1815-1898-the-iron-chancellor
116	Zwischen Berlin und Rom	https://alsineenspiegel.wordpress.com/2015/05/20/more-catholic-than-pius-ix-the-war-against-cardinal-marx-and-the-german-bishops/

121 Moritz von Blankenburg	https://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication/1667/edition/1375
121 Ignaz von Döllinger	http://www.polskokatolicki.pl/Ludzie_Kosciola/Niemcy/dollinger.htm
132 Cover Buku (Cambridge)	https://www.bookdepository.com/Childhood-Child-Labour-British-Industrial-Revolution-Jane-Humphries/9780521248969
135 Arnold Toynbee	https://www.researchgate.net/figure/Arnold-Toynbee-from-Toynbee-G-Reminiscences-and-Letters-of-Joseph-and-Arnold-Toynbee_fig1_51616049
135 Walt Whitman Rostow	https://www.hetwebsite.net/het/profiles/rostow.htm
139 Henri Saint-Simon	https://www.lifeder.com/henri-de-saint-simon/
139 Joseph Fourier	http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/PictDisplay/Fourier.html
139 P.J. Proudhon	https://libcom.org/library/general-idea-revolution-nineteenth-century-pierre-joseph-proudhon
140 Clemens von Metternich	http://sunnycv.com/steve/ww1/oldworld.html
140 François Pierre Guillaume Guizot	https://www.rakuten.com/shop/posterazzi/product/CNV435222740701/?sku=CNV435222740701&scid=pla_bing_posterazzi
142 <i>Die Arbeiterfrage und das Christenthum</i>	https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/images/70_1424.jpg
142 Cover buku Kard. R. Marx	https://www.casadellibro.com/ebook-christ-sein-heisst-politisch-sein-ebook/9783451338717/5528764
142 Perangko: Rheinland-Pfalz	http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/2285553

147 Adolph Kolping	https://www.wiederitzsch-im-blick.de/adolph-kolping-sein-leben-und-wirken-wirkungen-auf-heute/
147 F. Ozanam	https://www.babelio.com/auteur/Frederic-Ozanam/150727
147 Ferdinand Lassalle	https://www.art.com/products/p34960128307-sa-i9376463/ferdinand-lassalle-19th-century-german-jurist-and-socialist-political-activist.htm?RFID=990319
155 Patung Ketteler sebagai Pastor Dusun Hopsten	https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Hopsten_Kettelerdenkmal_2.jpg
171 Joseph Ernest Renan	https://imgc.artprintimages.com/img/print/joseph-ernest-renan-1823-1892-1892-1898_u-l-qlee2mm0.jpg?p=0
180 Antonio Fogazzaro	http://en.m.wikipedia.org/wiki/Antonio_Fogazzaro
180 Ernesto Buonaiuti	https://eunetcom.eu/ernesto-buonaiuti-56/
186 Alfred F. Loisy	https://www.jwstudybibles.com/2019/02/the-new-jerusalem-bible.html
186 George Tyrrell	https://images.findagrave.com/photos250/photos/2012/317/33481391_135281386541.jpg
186 F. von Hügel	https://www.britannica.com/biography/Friedrich-von-Hugel-Baron-von-Hugel
193 <i>Delle cinque piaghe</i>	http://www.korazym.org/61327/le-cinque-piaghe-della-santa-chiesa-cattolica-romana-il-rosminiano-trattato-dedicato-al-clero-cattolico/
193 Em. Kard. Billot	https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cardinal_Louis_Billot_S.J._(1846_-_1931).jpg
197 <i>Pascendi Dominici Gregis</i>	https://www.stjeromelibrary.org/store/p75/Pascendi_Dominici_Gregis%2C_Lamentabili_Sane%2C_The_Oath_Against_Modernism:_St._Pius_X_Reader.html

197 <i>Lamentabili Sane</i>	https://www.stjeromelibrary.org/store/p75/Pascendi_Dominici_Gregis%2C_Lamentabili_Sane%2C_The_Oath_Against_Modernism:_St._Pius_X_Reader.html
200 Marc Sangnier	https://www.nietzsche-en-france.fr/publications-sur-nietzsche/marc-sangnier/
200 Mgr. Umberto Benigni	https://en.wikipedia.org/wiki/Umberto_Benigni
207 Clemens August Graf von Galen	http://reflexionchretienne.e-monsite.com/pages/vie-des-saints/mars/bienheureux-clemens-august-graf-von-galen-cardinal-surnomme-le-lion-de-munster-fete-le-22-mars.html
210 Paus Benediktus XIV	https://collezioni.genusbononiae.it/products/dettaglio/8040
211 Teilhard de Chardin	https://www.thefamouspeople.com/profiles/pierre-teilhard-de-chardin-262.php
211 Jacques Maritain	https://awcungeneva.com/2020/11/20/jacques-maritain-november-18-1882-april-23-1973-world-citizen-philosopher/
211 Paus Benediktus XV	https://le-citazioni.it/autori/papa-benedetto-xv/frasi-sulla-guerra/
215 Mathieu Dreyfus	https://www.davidhalperin.net/a-case-of-clairvoyance-alfred-dreyfus-mathieu-dreyfus-and-leonie-the-psychic/
215 Pius XI	https://mrluptonhistory.co.uk/2020/04/25/why-did-the-nazi-party-try-to-control-religion-in-germany/
215 Pius XII	http://www.traditioninaction.org/HotTopics/f124_Dialogue_43.htm
216 Pidato Radio Paus Pius XII	https://catholicherald.co.uk/catholic-radio-stations-seek-expansion-thanks-to-increased-listenership/
218 Benito Mussolini	https://historydaily.org/benito-mussolini-facts-stories-trivia
218 Adolf Hitler	http://pngimg.com/image/30199

218 Hirohito	https://the-american-catholic.com/2017/12/01/december-1-1941-hirohito-gives-approval-for-war-against-us-and-great-britain/
221 Rupert Mayer, SJ	http://soul-candy.info/2014/10/nov-1-bl-rupert-mayer-sj-1876-1945-priest-martyr-the-apostle-of-munich/
221 Rpert Mayer & Prosesi	https://th.bing.com/th/id/R.1b726804bff4f64323ab44201665e47b?rik=
222 Pius XII di San Lorenzo	https://ariseletusbegoing.com/
223 <i>Cover Before the Dawn</i>	http://romancatholicheroes.blogspot.com/2010/10/eugenio-zolli-former-chief-rabbi-of.html
234 Image sur le site du Vatican	https://benoit-et-moi.fr/2012%20(II)/images/concile_510.jpg
236 Edward Schillebeckx	https://en.wikipedia.org/wiki/File:Edward_Schillebeeckx.jpg
236 Karl Rahner	https://images.findagrave.com/photos250/photos/2008/270/30100818_122250989563.jpg
236 Henri de Lubac	http://www.communio-argentina.com.ar/nuestros-fundadores/
236 Yves Congar	https://taigong788.skyrock.com/3222014987-Yves-Congar-le-theologien-qui-inspira-le-concile-Vatican-II.html
236 Hans Küng	https://sharedveracity.net/2021/04/09/hans-kung-dissent/
236 Joseph Ratzinger	https://www.pinterest.com/pin/173177548141297160/
243 Basilika St. Petrus	https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Basilica_di_San_Pietro_in_Vaticano_September_2015-1a.jpg
247 Paus Yohanes XXIII	http://fatherdaughtertalk.blogspot.com/2015/06/politics-and-papal-encyclicals.html

249	Konsili Vatikan II	https://burrowshirepodcast.com/wp-content/uploads/2020/07/VaticanII-1.jpg
251	Rosemary Radford Ruether	https://history.ucsd.edu/news-events/burke/past-lectures/rosemary-radford-ruether.html
258	Lamin Sanneh	https://www.christiancentury.org/sites/default/files/images/detail/lamin_sanneh_web.jpg
258	Sampul Majalah <i>Time</i>	http://content.time.com/time/covers/0,16641,19541025,00.html
266	Milton Stewart	https://www.findagrave.com/memorial/162427837/milton-stewart
266	Lyman Stewart	http://www.scvhistory.com/scvhistory/lymanstewart_biola.htm
267	Evolution Scopes Trial	https://traditionalism1920s.weebly.com/the-scopes-trial.html
267	Anti-Evolution League	https://www.aclu.org/aclu-history-maintaining-wall-freedom-and-religion
276	G. da Fiore, Waktu, & Allah Trinitas	https://www.pinterest.com/pin/281826889151557324/
282	Harold John Ockenga	https://www.goodreads.com/author/show/4007358.Harold_John_Ockenga
282	Carl Ferdinand Howard Henry	https://www.goodreads.com/author/show/308937.Carl_F_H_Henry
282	Billy Graham	https://www.thefamouspeople.com/profiles/images/billy-graham-7.jpg
284	Sampul Majalah <i>Christianity Today</i>	https://kgov.com/christianity-today-search-for-adam
284	<i>Greater Los Angeles Revival</i>	https://billygrahamlibrary.org/this-date-24sept1949/

Indeks Nama

- Alacoque, Margaretha M. 37
Allen, John Jr. 260
Armstrong, Karen 261-262, 270-271, 274
Agustinus, Uskup Hippo 271, 274
Baader, Franz von 151-152
Baur, Ferdinand Christian 99, 173
Benediktus XV, Paus 210-214
Bernardus Clairvaux 37, 81, 274
Bismarck, Otto von 108, 110-115, 167
Blankenburg, Moritz von 121
Bonaparte, Napoleon 46, 55, 78
Bryan, William Jennings 266
Buß, Franz Josef Ritter von 151
Buonaiuti, Ernesto 169, 180, 296
Chateaubriand, F.R. Vicomte de 152
Congar, Yves 99, 236, 246, 252
Dalberg-Acton, John (Lord Acton) 122
Darwin, Charles Robert 262, 266
Daudet, Léon 214, 216
Descartes, René 268
Döllinger, Ignaz von 79, 97, 101, 118, 121, 175, 271
Drey, John Sebastian von 121
Dreyfus, Alfred 88, 215
Duchesne, Louis-Marie-Olivier 177, 181, 196
Dupanloup, Félix Antoine Philibert 81, 91, 94-95, 119, 209
Engels, Friedrich von 137, 140, 153-154, 159
Falk, Paul Ludwig Adelbert 112
Fiore, Gioachino 295-296, 307

Fogazzaro, Antonio 178, 180-181
 Fourier, Joseph 138-139
 Fox, George 269
 Fransiskus, Paus 104, 224, 291
 Fransiskus Assisi 218, 277, 291
 Galilei, Galileo 39
 Garibaldi, Giuseppe 101, 141, 232, 244
 Gibbons, Kardinal 145, 148, 157, 162
 Goldie, Rosemary 252
 Görres, Johann Joseph von 151
 Graham, Billy 258, 265, 281-282, 284-285
 Guizot, François Pierre Guillaume 140
 Günther, Albert 123
 Hardenberg, F.L. Freiherr von 152
 Harnack, Adolph von 183-184
 Hefele, Karl Joseph von 121
 Henry, Carl F.H. 281-283
 Hirohito, Kaiser 218, 233
 Hirscher, Johann Baptist von 121
 Hitler, Adolf 204, 206, 218, 220, 233, 245
 Hügel, Friedrich von 179, 183, 186-187, 190-192, 199
 Ketteler, Wilhelm Emmanuel von 10, 119-120, 131, 141, 143-144, 148-150,
 154-157, 163, 165-166, 168
 King, William 165
 Kolping, Adolf 143, 147, 163
 Kuhn, Sebastian 121
 Lacordaire, J.B.Henri-Domonique 82, 85
 Lamennais, Hugues Felicité Robert de 75, 79, 82-86, 99, 185
 Lassalle, Ferdinand 143, 147, 165-167
 Laws, Curtis Lee 266
 Ledóchowski, Mieczyslaw Halka (Kardinal) 112
 Leo XIII, Paus 94, 108, 112, 131, 140-142, 145, 149, 155, 158, 184, 210, 238,
 253
 Loisy, Alfred F. 173, 175, 178, 181, 183-187, 190, 192, 195, 198
 Lortz, Joseph 8, 46

Louis XVI, Raja 47-48
Lubac, Henri de 99, 169, 236, 241, 246
Luther, Martin 122, 265, 270
Macfarlane, Helen 153
Manning, Kardinal Henry Edward 145, 148, 157
Martin, Konrad (Paderborn) 112
Marx, Karl 137, 140, 154, 159, 160
Maurras, Charles 214-216
Maritain, Jacques 211, 215
Mayer, Rupert 207, 221-222
Metternich, Clemens von 140
Montalembert, Charles René Frobes 80, 86
Möhler, Johann Adam 99, 121
Mussolini, Benito 218
Newman, John Henry 122
Ockenga, Harold J. 281-283
O'Meara, Thomas F. 278
Owen, Robert 165
Ozanam, Frédéric 143, 147, 163
Paulus VI, Paus 35, 234, 238, 253, 278
Pin, La Tour du 144, 148, 163
Pius IX, Paus 81, 89-91, 94-96, 98, 102-103, 108-109, 114-115, 119, 140, 142, 146, 149
Pius X, Paus 9, 34, 94, 149, 174, 181, 185, 196-198, 200-201, 204, 210, 213-217, 219-220
Pius XII, Paus 94, 204, 215-216, 222-224, 230, 238, 248
Proudhon, Joseph 138-139
Rahner, Karl 236, 241, 246
Ratzinger, Joseph 236, 242, 246
Renan, Ernest 171
Réville, Jean 173
Ricardo, David 135
Robertus Bellarminus 39, 261
Rosmini, Antonio 79, 80
Rostow, Walt Whitman 134-135

Rousseau, J.J. 82, 85
Ruether, Rosemary Radford 251
Sabatier, Auguste 173
Saint-Simon, Henri 138-139
Sanneh, Lamin 258
Sarda y Silvani, Felix 70
Schleiermacher, Friedrich 173-174
Schulze-Delitzsch, H. 165, 167
Semeria, Giovanni 178, 195
Smith, Adam 135, 164
Spener, Philipp Jakob 268
Stewart, Lyman 266
Stewart, Milton 266
Sybel, Heinrich Ferdinand von 107
Templeton, Charles 184
Thomas Aquinas 155-156, 187, 238, 253
Taylor, Charles 289
Tobin, Mary Luke 252
Toynbee, Arnold 134-135
Treitschke, Heinrich Gotthard von 108
Tyrell, George 169
Veuillot, Louis 90-91
Voetius, Gisbert 268
Vogelsang, Karl von 144
Wesley, John 269
Yohanes XXIII, Paus 233-234, 238, 240, 244-246, 253, 256
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig Graf von 270
Zola, Emile 88

